



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



Pemerintah Kabupaten
Kotawaringin Timur



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



Website : <https://dinsos.kotimkab.go.id>



IG : [dinassosialkotim](#)



[dinassosialkotim](#)



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-4 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja



Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Sampit, Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



HAWANAN, S.Sos
Rembina Utama Muda
NIP. 19680415 198911 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
IKHTISAR EKSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Maksud dan Tujuan	4
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	4
D. Isu Strategis Perangkat Daerah	19
E. Landasan Hukum	21
F. Sistematika	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	24
A. Rencana Strategis	24
B. Rencana Kinerja Tahun 2024	29
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A. Capaian Kinerja Organisasi	42
B. Realisasi Anggaran	79
C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90
D. Evaluasi Kinerja	99
E. Akuntabilitas Keuangan	99
BAB IV PENUTUP	101
LAMPIRAN	104



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 merupakan salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran untuk publik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban atas kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja Tahun 2024.

Hasil capaian pelaksanaan Rencana Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 menunjukkan rata-rata capaian kinerja dari 2 sasaran dan 7 Indikator yang telah ditetapkan adalah atau dikategorikan berhasil, terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Dalam mencapai kinerja tersebut Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 didukung dengan anggaran yang bersumber dari dana APBD sebesar Rp. 8.825.083.700,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp. 8.733.383.700,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 91.700.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 8.165.604.671,- atau capaian realisasi 89.13%

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan refleksi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024 oleh segenap unit bidang berdasarkan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung tercapainya visi dan misi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

Capaian kinerja yang diperoleh dan dapat dilaksanakan tidak lepas dari berbagai kendala yang dihadapi. Oleh karena itu Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur akan terus berupaya mengatasi hambatan untuk lebih meningkatkan kinerja pada masa mendatang.



BAB PENDAHULUAN

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas



dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Soisal Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKjIP Dinas Soisal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

Berdarkan Peraturan Peundang-Undangan Nomor 11 tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial disebutkan bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin serta perlindungan dan jaminan sosial yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat dengan kriteria masalah sosial kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana, korban tindak kekerasan, ekspliotasi dan diskriminasi.





B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur atas penggunaan anggaran. Maksud disusunnya Laporan Kinerja ini adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024. Tujuan pelaporan kinerja ini adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu sebagai berikut.

1.1. Kepala Dinas Sosial

Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Rehabilitasi Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Penanganan fakir miskin.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. Merumuskan perencanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;



- c. Melaksanakan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Mengarahkan penyelenggaraan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- g. Mengendalikan urusan administrasi di lingkungan Dinas Sosial;
- h. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Dinas Sosial;
- i. Menyampaikan laporan kinerja Dinas Sosial;
- j. Melaksanakan reformasi birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- k. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas Kepala Dinas Sosial;
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas Kepala Dinas Sosial kepada atasan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Untuk melaksanakan fungsinya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur mempunyai uraian tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;



- c. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi dinas sosial.

1.2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas di bidang Kesekretariatan meliputi fungsi melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga Dinas Sosial. Sekretaris Dinas membawahi Sub Bagian Umum dan Pelaporan dan Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan. Dalam melaksanakan Tugas Pokok, Kepala Dinas memiliki fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan program dan anggaran dinas;
- b. Penyelenggaraan urusan kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha surat menyurat, kearsipan, urusan perlengkapan/perbekalan, perpustakaan, hubungan masyarakat, protokol dan rumah tangga dinas;
- d. Penyusunan Anggaran dan pengelolaan administrasi keuangan;
- e. Pembinaan pegawai dan tenaga fungsional ;
- f. Pembinaan kegiatan KORPRI Unit Dinas Sosial;
- g. Penyelenggara urusan organisasi tata laksana dan analisis jabatan;
- h. Pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tupoksi sekretariat;



- i. Pengawasan urusan administrasi kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan.

Untuk melaksanakan fungsi, sekretaris mempunyai uraian tugas :

- a. Merumuskan rencana kerja Sekretariat Dinas Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan perumusan penyusunan rencana program dan anggaran, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas Sosial;
- c. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan pengelolaan urusan keuangan di lingkungan Dinas Sosial;
- d. Menyelenggarakan dan mengoordinasikan penataan organisasi dan tatalaksana, urusan hukum dan hubungan masyarakat di lingkungan Dinas Sosial;
- e. Melaksanakan dan mengoordinasikan urusan kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, dan tatausaha di lingkungan Dinas Sosial;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan program, pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta informasi di lingkungan Dinas Sosial;
- g. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknis di lingkungan Dinas Sosial;
- h. Membina, mengarahkan dan menyelenggarakan kegiatan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Sosial;
- i. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan laporan kinerja di lingkungan Dinas Sosial;
- j. Mengoordinasikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas Sosial;
- k. Mengoordinasikan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di lingkungan Dinas Sosial;
- l. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Dinas Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dinas Sosial;



- n. Melaporkan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas Sosial kepada atasan; dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

(1) Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan Pegawai ASN, serta penyiapan bahan penyusunan laporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
- b. Pengelolaan kearsipan;
- c. Pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan aset kantor;
- d. Pelaksanaan humas dan keprotokolan;
- e. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- f. Pelaksanaan peningkatan sumber daya manusia;
- g. Penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
- h. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
- i. Penyiapan bahan pembinaan PNS;
- j. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Dan Prosedur (SOP);
- l. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- m. Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);



- n. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.

Untuk melaksanakan fungsi Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan program kerja tahunan;
- b. Membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas ketatausahaan berupa surat menyurat dan melaksanakan kearsipan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terlaksananya tertib administrasi;
- d. Mengoordinasikan kegiatan penyelenggaraan urusan rumah tangga dan memberi petunjuk pelaksanaan agar tugas-tugas rumah tangga berjalan dengan baik;
- e. Memeriksa surat masuk dan surat keluar serta memantau penyelesaian surat yang sedang diproses agar penyelesaian surat tepat waktu, sasaran;
- f. Menyelenggarakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat agar seluruh acara dapat berjalan lancar;
- g. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- h. Menyusun analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- i. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;
- j. Melaksanakan penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi, pengembangan karir dan cuti pegawai;
- k. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan dinas;
- l. Mengoordinasikan urusan perlengkapan kantor dan memberi petunjuk pelaksanaannya agar tugas-tugas perlengkapan berjalan dengan baik;



- m. Membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
- n. Membuat saran pertimbangan pada bidang tugas Umum dan Pelaporan untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
- o. Mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan Usul Kenaikan Pangkat, Daftar Urut Kepangkatan, Karis/Karsu, Kartu Pegawai, Asuransi Kesehatan, Tabungan dan Asuransi Pensiun, Kenaikan Gaji Berkala, Cuti dan Pensiun pegawai Pegawai Negeri Sipil;
- p. Menyusun laporan dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- q. Menghimpun bahan penyusunan laporan penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- r. Menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional dan Prosedur (SOP);
- s. Melaksanakan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpul;
- t. pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- u. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- v. Mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- w. Memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut dan mengevaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Pelaporan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- x. Menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- y. Melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(2) Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan



pengolahan rencana program dan kegiatan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
- b. Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
- c. Penerbitan surat perintah membayar (SPM);
- d. Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
- e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- f. Pengumpulan bahan dan penyusunan rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA) dan perjanjian kinerja;
- g. Penyusunan rencana kerja anggaran (RKA); dan
- h. Penyusunan dan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dan dokumen perubahan pelaksanaan anggaran (DPPA).

Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan berdasarkan program kerja tahunan agar pelaksanaan tugas dan kegiatan terjadwal;
- b. membagi tugas kepada pelaksana di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan memberi arahan sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran;
- d. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
- e. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- g. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung dinas dan UPTD;
- h. melaksanakan verifikasi keuangan;
- i. melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;



- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- k. memeriksa hasil kerja bawahan untuk perbaikan guna penyempurnaan lebih lanjut;
- l. menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- m. membuat saran pertimbangan di Bidang Keuangan untuk mendapatkan keputusan pimpinan;
- n. membubuhkan paraf pada naskah dinas agar terciptanya tertib administrasi sesuai dengan Tata Naskah Dinas;
- o. mengoordinasikan bawahan dalam pelaksanaan tugas dan dalam penyusunan rancangan anggaran rutin dan pembangunan agar rencana anggaran sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan;
- p. mengikuti jalannya pembahasan dan penyusunan anggaran bersama unit/satuan kerja yang lain agar rencana anggaran dapat diperjuangkan;
- q. menyelia kegiatan bendahara agar dapat melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada administrasi keuangan yang berlaku;
- r. mengumpulkan bahan dan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja);
- s. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- t. menyusun dan melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- u. memeriksa hasil kerja bawahan guna penyempurnaan lebih lanjut mengevaluasi kegiatan Sub bagian Keuangan dan Perencanaan dan untuk mengetahui kesesuaian dengan rencana kerja;
- v. menilai prestasi kerja bawahan untuk bahan penetapan penilaian prestasi kerja;
- w. melaporkan pelaksanaan tugas/kegiatan baik secara lisan maupun tertulis berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



1.2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional bidang perlindungan dan jaminan sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perlindungan dan jaminan sosial;



- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan jaminan Sosial;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

1.3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang



pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan

- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

Untuk melaksanakan fungsi, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang Pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- f. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- g. Melaksanakan koordinasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas fungsi bidang Pemberdayaan Sosial serta penanganan fakir miskin;
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan penanganan fakir miskin kepada atasan; dan
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.



1.4. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Rehabilitasi sosial. Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang; dan
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.

Untuk melaksanakan fungsi, kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana kegiatan operasional Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang.
- c. Melaksanakan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;



- d. Menyusun bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- e. Melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- f. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, penyandang disabilitas, dan tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. Melaksanakan koordinasi bidang rehabilitasi sosial dengan instansi terkait;
- h. Membagi tugas, menyelia, mengatur dan mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi Sosial;
- i. Melaksanakan penilaian kinerja pegawai pada Bidang Rehabilitasi Sosial sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- j. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi bidang rehabilitasi Sosial; dan
- k. Melaporkan hasil kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial kepada atasan.
- l. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi





Jumlah Pegawai di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 24 (Dua Puluh Empat) Orang PNS, 1 (Satu) Orang PPPK dan 13 (Tiga Belas) Orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 1.1 Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak

NO	JABATAN	PNS	TENAGA KONTRAK	PPPK
1	KEPALA DINAS	1	-	-
2	SEKRETARIS DINAS	1	-	-
3	KEPALA BIDANG	3	-	-
4	KEPALA SUB BAGIAN	2	-	-
5	JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU	5	-	1
6	PELAKSANA/ STAF	12	13	-
JUMLAH		38		

Tabel 1.2 Jumlah PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Strata-2 (S-2)	4
2	Strata-1 (S-1)	12
3	Diploma-IV (D-IV)	4
4	Diploma-III (D-III)	7
5	SLTA	11
JUMLAH		38

**Tabel 1.3 Jumlah PNS berdasarkan Pangkat/ Golongan**

NO	PANGKAT	GOLONGAN	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/E	0
2	Pembina Utama Madya	IV/D	0
3	Pembina Utama Muda	IV/C	1
4	Pembina Tingkat I	IV/B	1
5	Pembina	IV/A	2
6	Penata Tingkat I	III/D	5
7	Penata	III/C	3
8	Penata Muda Tingkat I	III/B	3
9	Penata Muda	III/A	7
10	Pengatur Tingkat I	II/D	1
11	Pengatur	II/C	0
12	Pengatur Mudaa Tingkat I	II/B	0
13	Pengatur Muda	II/A	0
JUMLAH			24

D. Permasalahan Utama dan Isu-Isu Strategis

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.



Isu strategis perangkat daerah yang akan ditangani pada kurun waktu 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penguatan pelindungan sosial kelompok masyarakat rentan dan penduduk miskin;
2. Kontribusi anggaran yang belum seimbang antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi sehingga diperlukan kebijakan khusus yang mengarah pada keseimbangan pendanaan sehingga program program bisa berjalan dengan maksimal;
3. Perbedaan nomenklatur instansi sosial pada kabupaten kota yang menyebabkan pelayanan menjadi lebih sempit karena dukungan anggaran terbagi dengan sektor lain;
4. Proses rotasi yang cukup cepat di kabupaten/kota sehingga keberlanjutan program menjadi terganggu karena proses tersebut tidak disertai dengan regenerasi yang matang dalam perpindahan kekuasaan dalam organisasi;
5. Masih Lemahnya SDM Pengelola Data.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2024 sesuai ekspektasi masyarakat sebagai berikut :

1. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berupa Bantuan Kelompok Usaha Bersama;
2. Fasilitasi Bantuan Pengembangan ekonomi Keluarga berupa Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP);
3. Fasilitasi pemenuhan bantuan berupa alat bantu monilitas bagi Penyandang Disabilitas.



E. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor : 188.45/0413/Huk- ORG/2021 Tentang Penetapan Indikator Utama Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 01 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
6. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur;



E. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 adalah :

- | | |
|---------|---|
| BAB I | PENDAHULUAN |
| | Meliputi Gambaran Umum, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA |
| | Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA |
| | Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan. |
| BAB IV | PENUTUP |



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur. Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur telah melalui tahapan – tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 dengan melibatkan *stakeholders* pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1



(satu) tahun. Di dalam Renja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 adalah:

**“TERWUJUDNYA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR YANG
MANDIRI, MAJU DAN SEJAHTERA”**

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- ✚ Misi 1 : Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
- ✚ Misi 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, berdaya saing, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- ✚ Misi 3 : Mewujudkan penguatan ekonomi masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja
- ✚ Misi 4 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa (*Good Governance*)
- ✚ Misi 5 : Mewujudkan Kotawaringin Timur yang nyaman, lestari dan berbudaya

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 di atas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dalam penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan terkait pada misi ke-3 yaitu Mewujudkan Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Dan Penyediaan Lapangan Kerja. Berdasarkan paparan mengenai tujuan dari misi ke-3 di atas, Dinas Sosial secara langsung berkaitan dengan



sasaran strategis daerah yaitu **“Menguatnya Penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)”**.

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 sebanyak 1 (satu) tujuan dan 1 (satu) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai berikut :



Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatka Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PPKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PPKS yang diberdayakan	61,37	67,37	73,37	79,37	91,37	91,37
			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	69,93	74,93	79,93	84,93	94,99	94,99
			Persentase PPKS yang tertangani	70,05	75,05	80,05	85,05	95,05	95,05
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	93,59
			Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	34,07	46,07	58,07	70,07	94,07	94,07
			Persentase Taman Makam Pahlawan	70,91	75,91	80,91	85,91	95,91	95,91

Sumber : Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2021-2026

4. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024 adalah sebagai berikut.



Tabel 2.2

Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	
1.	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.1.	Persentase PSKS yang di berdayakan	%	$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS yang ada pada tahun ke } - n} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.2	Persentase Warga Migran yang dipulangkan	%	$\frac{\text{Jumlah OT yang dipulangkan}}{\text{Jumlah OT terdata pada tahun ke } - n} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.3	Persentase PPKS yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah seluruh PMKS pada tahun ke } - n} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.4	Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.5	Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	%	$\frac{\text{Jumlah anggota TAGANA yang tersedia}}{\text{Jumlah ketersediaan anggota TAGANA ditargetkan}} \times 100\%$	Dinas Sosial
		1.6	Persentase Taman Makam Pahlawan	%	$\frac{\text{Jumlah TMP yang terpelihara}}{\text{Jumlah TMP yang ada pada tahun ke } - n} \times 100\%$	Dinas Sosial

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024



B. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahunan (RKT) merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024.

Tabel 2.3

Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatka Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PPKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PPKS yang diberdayakan	%	73,37
			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	%	84,93
			Persentase PPKS yang tertangani	%	85,05
			Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial	%	88,59
			Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	%	70,07
			Persentase Taman Makam Pahlawan	%	85,91
2	Meningkatkan Program Penunjang Urusan Pemerintah Perangkat Daerah	MeningkatnyK ualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	%	100

Sumber : Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024



C. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 mengacu pada dokumen Renstra Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Pada tanggal 06 bulan Januari Tahun 2024 ditetapkan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dengan uraian sebagai berikut.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kotawaringin Timur Tahun 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.1	Presentase PSKS yang diberdayakan	73,37
		1.2	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	84,93
		1.3	Presentase PPKS yang tertangani	85,05
		1.4	Presentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	88,59
		1.5	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	70,07
		1.6	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	85,91
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100

Sumber : Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023



Perjanjian Kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut:

1. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
2. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Pada Bulan November 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikarenakan perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran serta adanya anggaran perubahan/ pergeseran dengan uraian target kinerja sebagai berikut :

Tabel 2.5
Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Timur

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET 2024 (Perubahan)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.1	Presentase PSKS yang diberdayakan	97,50
		1.2	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90
		1.3	Presentase PPKS yang tertangani	95,35
		1.4	Presentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	88,59
		1.5	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98,15
		1.6	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	900
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100

Sumber : Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2024



Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur :

Tabel 2.6**Program dan Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN (SESUDAH PERUBAHAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH			
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL			8,825,083,700
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	5,322,311,030
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	14	145,318,400
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	7	114,205,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	7	31,113,400
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	26	3,870,812,293
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SDM PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	14	3,697,652,293
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SDM Non PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	12	173,160,000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	7	82,550,000
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi	Terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Bagi PNS di	7	82,550,000



Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	64	425,712,707
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli tiap tahun	6	10,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	6	12,480,000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang dibeli tiap Tahun	6	15,000,000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Logistik lainnya yang disediakan dalam 1 Tahun	2	40,002,107
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10	20,100,600
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14	14,000,000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk Tamu per tahun	10	40,850,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	10	273,280,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	39	574,830,180
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun	12	4,700,000
Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar kantor per tahun	12	64,974,720
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	15	505,155,460
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	328	223,087,450
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan tertib bayar pajak	18	83,990,000



Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara dan dipenuhi BBM nya	12	79,652,450
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	292	26,505,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	32,940,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Pemberdayaan sosial		252,980,000
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	8	980,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	8	980,000
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	117	252,000,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	17	102,000,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	100	150,000,000
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan		50,700,000
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi di Daerah/ Kabupaten Kota	90	50,700,000



Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi di Daerah/ Kabupaten Kota	45	50,700,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PPKS yang tertangani		822,725,720
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	1232	782,725,720
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	845	253,765,320
Sub Kegiatan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	48,620,000
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang mendapatkan bantuan alat dengar, kursi roda dan kruk	91	259,280,000
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	14	30,611,514
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti yang didata dan dibina	56	57,680,000
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang keluarganya diberikan bimbingan sosial	56	13,800,000



Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan layanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA	17	2,380,000
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	32	3,440,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	40	66,248,536
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10	27,000,350
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/ikota	5	700,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	8	19,200,000
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	6	40,000,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan biaya pengobatan untuk layanan rujukan	6	40,000,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial		1,267,565,000
Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	12	3,480,000
Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Presentase anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	12	3,480,000
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	383	1,264,085,000



Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PPKS yang dihimpun	30	78,235,400
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan	100	120,140,200
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKH yang diberdayakan	33	450,349,400
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK yang dibantu program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	220	615,360,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana Alam/Sosial		982,018,150
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	111	565,278,150
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang diberikan bantuan	50	327,697,350
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tangap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten kota	50	159,580,800
Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2	64,800,000
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	9	13,200,000
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	32	416,740,000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	32	416,740,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dikelola	2	126,783,800



Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	2	126,783,800
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2	126,783,800
JUMLAH BELANJA			8,825,083,700

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023 Sesuai Perubahan Target Dalam Perjanjian Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur selaku pengembal amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/ sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.



Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
II	76% ≤ 90%	Tinggi
III	66% ≤ 75%	Sedang
IV	51% ≤ 65%	Rendah
V	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Kabupaten Kotawaringin Timur dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2024. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial.



A. Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut.



Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	SUMBER DATA	
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	1.1	Presentase PSKS yang diberdayakan	97.5	98.24	100.76	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		1.2	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90	84.66	94.07	Sangat Tinggi	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.3	Presentase PPKS yang tertangani	95.35	99.23	104.07	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
		1.4	Presentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	88.59	97.20	109.72	Sangat Tinggi	Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
		1.5	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98.15	100	101.88	Sangat Tinggi	Bidang Pelindungan dan Jaminan Sosial
		1.6	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	100	100	Sangat Tinggi	Bidang Pemberdayaan Soisal dan Penanganan Fakir Miskin
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	2.1	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	100	Sangat Tinggi	Sekretariat



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.1

“Persentase PSKS yang diberdayakan”

Realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 98.24% dari 97.5% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 100.76% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.1

1. Realisasi target Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) pada tahun 2024 sebanyak 16 Orang dari 17 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 94.12% (Kategori Tinggi)
2. Realisasi target Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Karang Taruna) pada tahun 2024 sebanyak yaitu 1 lembaga yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)
3. Realisasi target Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Pendamping Program Keluarga Harapan) pada tahun 2024 sebanyak 39 Orang dari 39 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah PSKS yang diberdayakan sebanyak 56 Orang dari 57 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 98,29%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah PSKS yang diberdayakan}}{\text{Jumlah PSKS yang ada pada tahun ke - n}} \times 100\%$$

$$\frac{36}{37} \times 100\% = 98,24\%$$



Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2024 (perubahan) yaitu :

$$\frac{98,29}{97.550} \times 100 = 100.76\%$$

(Kategori Sangat Tinggi)

SASARAN 1

“ Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.2

“Persentase Warga Migran Yang Di Pulangkan”

Realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 86.66% dari 90% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 96.29% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.2

1. Realisasi Kegiatan Warga Negara Migran Yang Dipulangkan / Orang Terlantar yang dipulangkan pada tahun 2024 sebanyak 39 Orang dari 45 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 86.66% (Kategori Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah warga negara migran yang dipulangkan sebanyak 89 Orang dari 100 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 89%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah OT yang dipulangkan}}{\text{Jumlah OT pada tahun ke - n}} \times 100\%$$

$$\frac{39}{45} \times 100\% = 86.66\%$$



Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan terget pada perjanjian kinerja tahun 2024 (perubahan) yaitu :

$$\frac{86.66}{90} \times 100 = \mathbf{96.29\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)

SASARAN 1

“ Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.3

“Persentase PPKS Yang Tertangani”

Realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 99.23% dari 95.35% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 104.07% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.3

1. Realisasi target PPKS yang tertangani dalam Rehabilitasi Sosial pada tahun 2024 sebanyak 1031 Orang dari 1039 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 99.23% (Kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah PPKS yang tertangani sebanyak 1031 Orang dari 1039 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 99.23%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang Tertangani}}{\text{Jumlah seluruh PMKS pada tahun ke - n}} \times 100\%$$

$$\frac{1031}{1039} \times 100\% = \mathbf{99.23\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2024 (perubahan) yaitu :

$$\frac{99.23}{95.23} \times 100 = \mathbf{104.07\%}$$



(Kategori Sangat Tinggi)

SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.4

“Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

Realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 97.20% dari 88.59% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 109.72% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.4

1. Realisasi target PPKS memperoleh bantuan bencana alam/ sosial pada tahun 2024 sebanyak 48 Orang dari 48 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)
2. Realisasi target PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Permakanan pada tahun 2024 sebanyak 845 Orang dari 845 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)
3. Realisasi target PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Sandang pada tahun 2024 sebanyak 15 Orang dari 50 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 30% (Kategori Sangat Rendah)
4. Realisasi target PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Alat Bantu pada tahun 2024 sebanyak 91 Orang dari 91 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)
5. Realisasi target PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dan Usaha Ekonomi Produtif (UEP) pada tahun 2024 sebanyak 220 Orang dari 220 Orang sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah PPKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 1219 Orang dari 1254 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 97.20%.



Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$$

$$\frac{1219}{1254} \times 100\% = \mathbf{97.20\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2024 (perubahan) yaitu :

$$\frac{97.20}{88.59} \times 100 = \mathbf{109.72\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.5

“Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA”

Realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 100% dari 98.15% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 101.88% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.5

1. Realisasi target ketersediaan Tenaga Terampil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) pada tahun 2024 sebanyak 33 Orang dari 33 Orang yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah ketersediaan Tenaga Terampil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 33 Orang dari 33 Orang sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 100%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah anggota TAGANA yang tersedia}}{\text{Jumlah ketersediaan anggota TAGANA ditargetkan}} \times 100\%$$

$$\frac{33}{33} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2024 (perubahan) yaitu :

$$\frac{33}{33} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 1

“Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

INDIKATOR 1.6

“Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara”

Realisasi capaian pada tahun 2024 sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 1.6

1. Realisasi target Taman Makam Pahlawan yang terpelihara sebanyak 2 TMP dari 2 TMP yang ada sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi).

Dari hasil monitoring yang dilakukan, jumlah TMP yang terpelihara sebanyak 2 TMP dari 2 TMP sehingga realisasi capaian yang diperoleh sebesar 100%.

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Jumlah TMP yang terpelihara}}{\text{Jumlah TMP yang ada pada tahun ke } - n} \times 100\%$$

$$\frac{2}{2} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2023 (perubahan) yaitu :

$$\frac{100}{100} \times 100 = \mathbf{101.01\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)



SASARAN 2

“Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah”

INDIKATOR 2.1

“Persentase Tingkat Pemenuhan Komponen Penunjang Perangkat Daerah yang Sesuai Ketentuan Perundangan”

Realisasi capaian pada tahun 2023 sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan atau persentase capaian sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi)

Variabel pendukung pencapaian target kinerja Indikator 2.1

1. Realisasi target program/kegiatan sekretariat sebesar 100% dari 100% yang ditargetkan sehingga persentase capaian yang diperoleh sebesar 100% (Kategori Sangat Tinggi).

Perhitungan indikator kinerja sasaran :

$$\frac{\text{Realisasi capaian fisik komponen penunjang perangkat daerah}}{\text{Target Capaian}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{100} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Maka, capaian kinerja yang diperoleh berdasarkan target pada perjanjian kinerja tahun 2024 (perubahan) yaitu :

$$\frac{100}{100} \times 100 = \mathbf{100\%}$$

(Kategori Sangat Tinggi)

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 3.3
Perbandingan Capaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	2022			2023			2024		
			TARGET RENSTRA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	TARGET RENSTRA	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	67.37	99.15	147%	97	98.29	101%	97.50	98.24	100.76%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	74.93	100	133%	90	89.00	99%	90	86.66	96.29%
		Presentase PPKS yang tertangani	75.05	156	208%	95	91.94	97%	95.35	99.23	104.07%
		Presentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	78.59	166	211%	84	80.40	96%	88.59	97.2	109.72%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	46.07	80	174%	98	95	97%	98.15	100	101.88%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	75.91	100	132%	99	100	101%	100	100	100%
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	100%	100	100	100%	100	100	100%



Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase PSKS yang diberdayakan pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan, dikarenakan anggota Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang ada di Kecamatan Pulau Hanaut dan Kecamatan Telaga Antang tidak ada (meninggal dunia) pada tahun 2023, sehingga dilakukan seleksi kembali untuk mengisi posisi TKSK tersebut pada tahun selanjutnya. Pada tahun 2024, tenaga yang ada di setiap Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur telah terisi yaitu 17 (Tujuh Belas Orang) untuk 17 Kecamatan. Akan tetapi, pada Triwulan IV tahun 2024, TKSK Kecamatan Bukit Santuai mengundurkan diri sehingga jumlah TKSK keseluruhan tersisa 16 (Enam Belas) Orang. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur telah membuka seleksi untuk memenuhi posisi TKSK yang kosong untuk tahun selanjutnya dan telah diusulkan ke Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase Warga Negara Migran Yang Dipulangkan Tahun 2024 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami penurunan, dikarenakan ada beberapa oknum yang mengaku terlantar akan tetapi masih belum masuk sebagai kriteria warga migran yang bisa dipulangkan ke daerah asal serta sudah terpenuhinya pemulangan warga migran untuk dipulangkan ke daerah asalnya sampai Triwulan IV. Pada tahun 2023, warga negara migran yang dipulangkan ke daerah asal sebanyak 89 (Delapan Puluh Sembilan) Orang dan mengalami penurunan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 39 (Tiga Puluh Sembilan) Orang. Artinya adanya penurunan sekitar 43,82% kasus Orang Terlantar di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator



kinerja Persentase PPKS yang tertangani Tahun 2024 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023 dan adanya kenaikan kembali pada tahun 2024. PPKS yang ditangani yaitu PPKS yang memerlukan pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Korban Bencana Alam/Sosial. Terjadinya kenaikan realisasi dari 2021 ke 2022 disebabkan banyaknya penanganan sosial kepada masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, kebakaran rumah dan banjir. Kemudian terjadi penurunan realisasi kembali pada tahun 2023 karena hanya penanganan peristiwa kebakaran rumah. Pada tahun 2024, Persentase PPKS yang tertangani semakin meningkat karna banyaknya kasus yang ditemukan di masyarakat dan adanya penambahan anggaran.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial Tahun 2024 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023. Terjadinya kenaikan realisasi dari 2021 ke 2022 karena adanya peningkatan PPKS yang menerima bantuan sosial seperti disebabkan banyaknya masyarakat yang menerima dampak dari pandemi Covid-19, korban bencana banjir dan kebakaran rumah serta KPM yang menerima bantuan KUBE dan UEP serta bantuan sosial berupa Alat Bantu dan Permakanan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan, artinya berkurangnya PPKS yang mendapatkan bantuan sosial. Pada tahun 2024, Persentase PPKS yang mendapatkan bantuan sosial meningkat dua kali lipat dari tahun 2023. Hal ini terjadi karena meningkatnya usulan data penerima bantuan sosial berdasarkan keadaan dilapangan atau laporan dari masyarakat.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase ketersediaan Tenaga Terampil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Tahun 2024 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami kenaikan pada tahun 2021-2022 kemudian mengalami penurunan pada tahun 2023.



Hal ini disebabkan karena adanya anggota TAGANA yang mengundurkan diri kemudian dilakukan seleksi kembali untuk penambahan anggota TAGANA pada tahun 2023. Pada tahun 2024, Ketersediaan Tenaga Terampil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebanyak 33 (Tiga Puluh Tiga) Orang dengan persentase capaian sebesar 100%.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 1 yaitu “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan indikator kinerja Persentase Taman Makam Pahlawan Yang Dipelihara Tahun 2024 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya stabil yaitu 100%. Terdapat 2 (dua) Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dipelihara oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur berlokasi di Jalan Jendral Sudirman KM. 8 Sampit dan di Jalan Jaya Kelapa Kecamatan Mentaya Hilir Selatan.

Perbandingan realisasi kinerja sasaran strategis 2 yaitu “Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah” dengan indikator kinerja Persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai perundangan Tahun 2024 terhadap realisasi kinerja capaian tahun-tahun sebelumnya stabil yaitu 100%.



Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI KINERJA TAHUN 2024	TARGET AKHIR 2026	TINGKAT KEMAJUAN
1	2	3	5	6	7
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	98.24	91.37	108%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	86.66	94.99	91%
		Presentase PMKS yang tertangani	99.23	95.05	104%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	97.2	93.59	104%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	100	94.07	106%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	91.91	109%
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	100%



Berdasarkan penyajian data Tabel 3.4 maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase PSKS yang diberdayakan pada tahun 2024 telah mencapai 108% dengan kategori “**Baik**”.
2. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase Warga Migran Yang dipulangkan pada tahun 2024 telah mencapai 91% dengan kategori “**Baik**”.
3. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase PPKS yang tertangani pada tahun 2024 telah mencapai 104% dengan kategori “**Baik**”.
4. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial pada tahun 2024 telah mencapai 104% dengan kategori “**Baik**”.
5. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase ketersediaan tegana terampil TAGANA pada tahun 2024 telah mencapai 106% dengan kategori “**Baik**”.
6. Capaian kinerja sasaran strategis “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial” dengan Persentase taman makam pahlawan yang terpelihara pada tahun 2024 telah mencapai 109% dengan kategori “**Baik**”.
7. Capaian kinerja sasaran strategis “Meningkatnya kualitas capaian kinerja perangkat daerah” dengan Persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundangan pada tahun 2023 telah mencapai 100% dengan kategori “**Baik**”.



Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5

Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET (PERUBAHAN)	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	97.50	98.24	100.76
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90	86.66	96.29
		Presentase PPKS yang tertangani	95.35	99.23	104.07
		Presentase PPKS yang memperoleh Bantuan Sosial	88.59	97.2	109.72
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98.15	100	101.88
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	100	100
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	100

Interpretasi Hasil Analisis Keberhasilan, Kegagalan/Hambatan dan Solusi/Upaya yang dilakukan sebagai berikut.

✚ Indikator Kinerja Sasaran “Persentase PSKS yang Diberdayakan”

Realisasi capaian persentase partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun 2024 adalah sebesar 98.24% dari yang ditargetkan 97.50% yaitu sebesar 100.76%. Semakin tingginya partisipasi PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka semakin tinggi usaha PSKS dalam



melaksanakan pendampingan sosial tentang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam rangka penanganan masalah kesejahteraan sosial.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial (Permensos No.8 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial).

Partisipasi PSKS dalam penanganan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilihat dari keaktifan dan kontribusinya. Pada Tahun 2024 Capaian partisipasi potensi dan sumber kesejahteraan sosial melebihi dari yang ditargetkan, yaitu tercapai 100.76%. PSKS yang aktif dalam mendampingi dan memberikan pelayanan ke PPKS antara lain TKSK, PKH dan Karang Taruna. Dengan adanya peningkatan jumlah PSKS ini maka semakin tinggi usaha Pemerintah Kab. Kotawaringin Timur dalam meningkatkan partisipasi PSKS bersama dengan pendamping sosial lainnya dalam usaha kesejahteraan sosial dalam penanganan PPKS.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Adanya koordinasi dan sinergitas yang baik antara PSKS dengan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, pihak desa serta pihak terkait lainnya dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Adanya semangat dan motivasi dari para PSKS sendiri untuk ikut berkontribusi dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan kesejahteraan sosial;

Faktor kegagalan/ penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Terjadi pergantian PSKS di masa tahun berjalan, mengundurkan diri sebagai PSKS dikarenakan kesibukan pekerjaan, pindah kota atau alamat tinggal sehingga mempengaruhi kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Masih belum maksimalnya kegiatan peningkatan kapasitas bagi para PSKS.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Membuat komitmen berupa perjanjian kerja sebelum memulai menjadi PSKS dalam hal ini (SDM PKH, TKSK dan Karang Taruna) dengan masa kerja beberapa tahun;
2. Meningkatkan kualitas PSKS melalui pembinaan dan pelatihan penilaian kompetensi dan kapasitas PSKS;

Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Warga Migran Yang Dipulangkan”

Realisasi capaian persentase partisipasi PPKS yang merupakan orang terlantar yang dipulangkan ke daerah asal tahun 2024 adalah sebesar 86.66% dari yang ditargetkan 90% yaitu sebesar 96.29 %. Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan penanganan dengan mengimplementasikan berbagai kebijakan untuk PPKS tersebut dapat terpenuhi kebutuhannya dasarnya.

Orang Terlantar adalah seseorang, keluarga, kelompok warga negara yang karena alasan ideologis, politis, ekonomi dan sosial budaya mengalami keterlantaran baik dalam negeri dan yang ada diluar negeri dan berkeinginan untuk kembali ke tempat asalnya namun tidak memiliki daya dan kemampuan. Orang terlantar dikelompokkan sebagai salah satu bencana sosial yang memiliki kriteria tidak dapat diramalkan sebelumnya karena bersifat mendadak, tidak terencana dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya. Dalam penanganan Orang Terlantar sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2012 berisikan tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang harus terfokus, terpadu dan berkelanjutan”.

Pada Tahun 2024 Capaian warga negara migran yang dipulangkan/ orang terlantar yaitu tercapai 96.29%. Berdasarkan kondisi dilapangan, pemohon harus memenuhi beberapa persyaratan dan pemeriksaan untuk menentukan apakah pemulangan ke daerah asal disetujui/tidak.



Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Tersedianya shalter/ Rumah Singgah sebagai tempat sementara Orang Terlantar yang akan dipulangkan apabila memenuhi syarat pemulangan.

Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Adanya keterbatasan anggaran untuk pemulangan Orang Terlantar (OT).
2. Orang terlantar yang tidak memiliki identitas sehingga proses penyelesaian kasus ini membutuhkan waktu;
3. Kurangnya SDM dalam mengelola Rumah Singgah;

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Menyediakan SDM khusus untuk menjaga dan mengakomidir di Rumah Singgah sehingga mempercepat penanganan, tidak hanya untuk Orang Terlantar saja akan tetapi PPKS lainnya yang ada di Rumah Singgah.
2. Penyesuaian anggaran agar pemulangan Orang Terlantar (OT) dapat difasilitasi.

🚦 Indikator Kinerja Sasaran “Persentase PPKS yang Tertangani”

Realisasi capaian persentase PPKS yang tertangani tahun 2024 adalah sebesar 99,23% dari yang ditargetkan 95.35% yaitu sebesar 104.07%. Semakin tinggi persentase PPKS yang Tertangani artinya semakin banyak jumlah PPKS di Kabupaten Kotawaringin Timur yang menerima pelayanan untuk memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan dalam kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Penanganan PPKS yang dimaksud berupa semua bentuk pelayanan yang diberikan kepada PPKS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pelayanan kepada PPKS tersebut dapat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, baik pangan, sandang, kesehatan, pemenuhan alat bantu, pemberian rujukan, rehabilitasi sosial, maupun kebutuhan lain yang dibutuhkan masing masing PPKS. Capaian PPKS



yang tertangani sudah hampir sama dengan yang ditargetkan, yaitu tercapai 104.07%.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Daya tanggap yang baik dari Para Pekerja Sosial yang menangani berserta mitra kerja dan beberapa pihak terkait dan mampu mendeteksi secara dini permasalahan sosial yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial lebih dapat menjangkau ke seluruh penerima manfaat yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur secara lebih efektif dan efisien;
2. Adanya pembaharuan Data DTKS sehingga memudahkan dalam penanganan PPKS yang tepat sasaran.

Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Setiap PPKS memiliki karakteristik permasalahan tersendiri, sedangkan ketersediaan sumber daya yang ada, baik sarana dan prasarana serta SDM sangat terbatas;
2. Terdapat PPKS yang sudah terdata untuk difasilitasi, akan tetapi PPKS tersebut tidak melapor sehingga tidak terlaksana.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Melakukan penambahan Sumber Daya Manusia (SDM)/ pekerja sosial agar pelayanan dapat terlaksana lebih maksimal;
2. Melakukan konfirmasi terhadap PPKS yang akan difasilitasi, agar dapat memenuhi ketentuan dan persyaratan agar proses penanganan lebih mudah dan cepat.



Indikator Kinerja Sasaran “Persentase PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial”

Realisasi capaian persentase yang Memperoleh Bantuan Sosial tahun 2024 adalah sebesar 97,20% dari yang ditargetkan 88.59% yaitu sebesar 109.72%. Pemberian bantuan sosial kepada PPKS yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan pemenuhan kebutuhan dasarnya.

PPKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, kelompok dan/ atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterkantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan, keterasingan dan perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung seperti terjadinya bencana sehingga penanganan PPKS seharusnya menjadi salah satu program prioritas pemerintah.

Capaian realisasi persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial melebihi dari yang ditargetkan, yaitu sebesar 109.72%. Bantuan sosial yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur kepada PPKS yaitu Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Alat Bantu (kursi roda), Bantuan Permakanan, Bantuan Sandang, dll.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat dengan aplikasi SIKS-NG;
2. Koordinasi yang baik antar intern Dinas Sosial maupun mitra kerja dan pihak terkait lainnya (Desa/Kelurahan/Kecamatan);



Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Terdapat beberapa PPKS yang tidak memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan sosial;

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Dilakukan pembaharuan data DTKS sehingga diharapkan mampu meningkatkan akurasi pelayanan yang dibutuhkan masing-masing Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS) terutama dalam sasaran penerima bantuan sosial yang tepat sasaran;

✚ Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA”

Realisasi capaian persentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA tahun 2024 adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan 101.88% yaitu sebesar 96,94%. Semakin tingginya partisipasi Tenaga Taruna Siaga Bencana (TAGANA) penyelenggaraan kesejahteraan sosial terutama terkait penanganan bencana bidang perlindungan sosial, maka semakin tanggap dan cepat juga penanganan yang dilakukan. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berasal dari masyarakat dan memiliki kepedulian serta aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran ini yaitu :

1. Koordinasi yang baik dengan beberapa pihak terkait seperti Desa/Kelurahan, BPBD dan dinas terkait;
2. Melakukan pelayanan darurat yang cepat dan tanggap terhadap korban bencana serta membantu melakukan tindakan (pendirian shalter, tim logistik dan dapur umum).



Faktor kegagalan/penghambat dalam mencapai target indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Belum adanya penambahan Tenaga Terampil TAGANA dikarenakan anggaran yang terbatas.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Optimalisasi peran Tenaga Terampil TAGANA yang tersedia dalam mitigasi dan penanggulangan bencana baik bencana alam, bencana non alam, maupun bencana sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur dan melakukan pengembangan SDM dengan pelatihan-pelatihan tentang penanganan bencana.
2. Ikut mengerahkan potensi dan SDM/ relawan/ masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar.



Indikator Kinerja Sasaran “Persentase Taman Makam Pahlawan Yang terpelihara”

Realisasi capaian persentase taman makam pahlawan yang terpelihara tahun 2024 adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan 100% yaitu sebesar 1000%. Terdapat 2 Taman Makam Pahlawan (TMP) yang dilakukan pemeliharaan/ rehabilitasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga capaian menunjukkan nilai 100% dimana melebihi target yang ditetapkan yaitu 100%.

Taman Makam Pahlawan merupakan sarana pelatarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiawaanan Sosial sehingga dalam rangka mewujudkan pelestarian dan penadyagunaan Nilai-Nilai Kepahlawanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara perlu adanya peningkatan pemeliharaan komponen fisik, kebersihan dan keindahan serta terjaga dan terawatnya Taman Makam Pahlawan (TMP) yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu :

1. Terpelihara dan terkelolanya komponen fisik Taman Makam Pahlawan yang ada di bawah Dinas Sosial sesuai standar;
2. Terjaga, tertanam dan terlestarikannya nilai-nilai kesetiakawanan sosial kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran:

1. Memberikan penanaman nilai kesetiakawanan sosial pada generasi muda terutama anak-anak sekolah melalui kegiatan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kepahlwanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
2. Melakukan bakti sosial untuk menjaga kebersihan di Taman Makam Pahlawan (TMP) di Kabupaten Kotawaringin Timur.



✚ Indikator Kinerja Sasaran “Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan”

Realisasi capaian persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan tahun 2024 adalah sebesar 100% dari yang ditargetkan 100% yaitu sebesar 100%. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota adalah pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur yang membutuhkan keselarasan dalam pemenuhan pelayanan dan penekanan pada skala pembangunan. Penetapan prioritas ini didasarkan pada rencana pembangunan yang berkesinambungan serta evaluasi pada rencana pembangunan sebelumnya, sehingga pencapaian tujuan pelayanan akan terpenuhi sesuai standard pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur.

Faktor pendukung keberhasilan dalam pencapaian indikator kinerja sasaran yaitu Meningkatnya pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas pegawai

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja indikator kinerja sasaran:

1. Meningkatkan kembali pengembangan sarana dan prasarana serta pengembangan kapasitas pegawai dengan mengikuti pelatihan/ bimbingan teknis.
2. Penyusunan rencana kegiatan pada tahun berjalan secara terstruktur dan efisien.
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kegiatan secara berkala untuk setiap kegiatan yang telah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.



Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel 3.6

Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

NO	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PERSENTASE CAPAIAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan		PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Presentase PSKS yang diberdayakan	97.5	98.24	100.76	Menunjang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dibina	57	56	98.25	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK yang diberdayakan	17	16	94.12	
				Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Karang Taruna yang diberdayakan	1	1	100	
				Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah PKH yang diberdayakan	39	39	100	
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan		PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90	86.66	96.29	Menunjang



			Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi di Daerah/ Kabupaten Kota	45	39	86.67	
			Sub Kegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Yang Dipulangkan Dari Titik Debarkasi di Daerah/ Kabupaten Kota	45	39	86.67	
	Presentase PMKS yang tertangani	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Presentase PMKS yang tertangani	Presentase PMKS yang tertangani	95.35	99.23	104.07	Menunjang
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	1224	1193	97.47		
		Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	845	845	100		



				Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	50	15	30	
				Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Disabilitas yang mendapatkan bantuan alat dengar, kursi roda dan kruk	91	91	100	
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga	14	14	100	
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia terlantar, serta gelandangan pengemis diluar panti yang didata dan dibina	56	56	100	
				Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang keluarganya diberikan bimbingan sosial	56	56	100	



				Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan layanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA	17	17	100	
				Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah PPKS yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar	32	32	100	
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kab/kota	40	42	105	
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10	11	110	
				Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/ikota	5	6	120	
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	8	8	100	



				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Rehabilitasi Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar	6	7	117	
				Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah PMKS yang diberikan bantuan biaya pengobatan untuk layanan rujukan	6	7	117	
				Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Presentase anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	12	12	100	
				Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak terlantar yang didata dan diberikan pembinaan	12	12	100	
				Pengumpulan sumbangan dalam daerah kabupaten/ kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	8	8	100	
				Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	8	8	100	



Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	88.59	97.20	109.72	Menunjang
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase keluarga fakir miskin yang didata dan difasilitasi	350	351	100	
	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data PMKS yang dihimpun	30	31	103.33	
	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Makanan dan minuman rapat yang disediakan	100	100	100	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah KK yang dibantu program Kelompok Usaha Bersama (KUBE)	220	220	100	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Presentase korban bencana alam dan sosial yang difasilitasi kebutuhan dasarnya	111	107	96	
	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Jumlah Korban bencana alam/ sosial yang diberikan bantuan	50	48	96	
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan kabupaten kota	50	48	96	



			Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	2	2	100	
			Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan kabupaten/kota	9	9	100	
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98.15	100	101.88	Menunjang
			Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan				
			Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Taruna Siaga Bencana yang diberdayakan	32	32	100	
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100	100	100	Menunjang
			Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara				
			Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	2	2	100	
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100	100	100	Menunjang



				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Presentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang terlaksana	14	14	100	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	7	7	100	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja yang dibuat yang dilaksanakan dalam 1 Tahun	7	7	100	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase administrasi keuangan perangkat daerah yang terpenuhi	26	26	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah SDM PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	14	14	100	
				Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah SDM Non PNS dan Dokumentasi administrasi Keuangan	12	12	100	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terlaksana	7	7	100	
				Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terpenuhinya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis Bagi PNS di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7	7	100	



			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase penyediaan administrasi umum perangkat daerah	64	63	98
			Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik yang di beli tiap tahun	6	6	100
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang di beli	6	6	100
			Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang dibeli tiap Tahun	6	6	100
			Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah ATK dan Logistik lainnya yang disediakan dalam 1 Tahun	2	2	100
			Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	10	10	100
			Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	14	13	93
			Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan untuk Tamu per tahun	10	10	100
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi ke luar daerah yang dihadiri	10	10	100



				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	39	37	95	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat bermaterai yang dilayani per tahun	12	12	100	
				Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik yang dibayar kantor per tahun	12	11	92	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa pelayanan umum	15	14	93	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terlaksana	328	327	99.7	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara dan tertib bayar pajak	18	16	89	
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional yang dipelihara dan dipenuhi BBM nya	12	12	100	
				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Luas Gedung Kantor yang dipelihara	292	293	100	



				Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	6	6	100	
--	--	--	--	---	--	---	---	-----	--



Berdasarkan Penyajian data pada Tabel 3.6, maka dapat disimpulkan bahwa Program yang mendukung tercapainya **Sasaran 1 “Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial”** yaitu :

1. Program Pemberdayaan Sosial
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Program yang mendukung tercapainya **Sasaran 2 “Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah”** yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut :



Tabel 3.7
Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	ANGGARAN (SEBELUM PERUBAHAN)	ANGGARAN (SESUDAH PERUBAHAN)	TOTAL REALISASI		SISA ANGGARAN
			KEUANGAN		
			(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH					
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	7,110,083,700	8,825,083,700			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,021,140,500	5,322,311,030	4,850,819,710.00	91.14	471,491,320
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	116,093,400	145,318,400	143,904,516	99.03	1,413,884
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	84,990,000	114,205,000	113,576,141	99.45	628,859
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31,103,400	31,113,400	30,328,375	97.48	785,025
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,860,252,293	3,870,812,293	3,484,943,264	90.03	385,869,029
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,697,652,293	3,697,652,293	3,318,443,264	89.74	379,209,029
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	162,600,000	173,160,000	166,500,000	96.15	6,660,000
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	65,510,000	82,550,000	73,995,625	89.64	8,554,375
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	65,510,000	82,550,000	73,995,625	89.64	8,554,375



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	244,433,779	425,712,707	421,030,200	98.90	4,682,507
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	10,000,000	9,967,900	99.68	32,100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,480,000	12,480,000	10,940,000	87.66	1,540,000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	15,000,000	14,883,000	99.22	117,000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,003,179	40,002,107	39,898,500	99.74	103,607
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,100,600	20,100,600	20,100,050	100.00	550
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6,000,000	14,000,000	12,225,000	87.32	1,775,000
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	40,850,000	40,850,000	40,740,000	99.73	110,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100,000,000	273,280,000	272,275,750	99.63	1,004,250
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	490,451,028	574,830,180	517,238,636	89.98	57,591,544
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,000,000	4,700,000	4,700,000	100.00	-
Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70,685,568	64,974,720	48,422,313	74.52	16,552,407
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	413,855,460	505,155,460	464,116,323	91.88	41,039,137
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244,310,000	223,087,450	209,707,469	94.00	13,379,981



Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	52,410,000	83,990,000	73,134,700	87.08	10,855,300
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59,850,000	79,652,450	79,651,769	100.00	681
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	87,110,000	26,505,000	25,710,000	97.00	795,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	30,940,000	32,940,000	31,211,000	94.75	1,729,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	252,980,000	252,980,000	243,480,000	96.24	9,500,000
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	980,000	980,000	980,000	100.00	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	980,000	980,000	980,000	100.00	-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	252,000,000	252,000,000	242,500,000	96.23	9,500,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102,000,000	102,000,000	92,500,000	90.69	9,500,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	150,000,000	150,000,000	100.00	-
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50,700,000	50,700,000	35,737,000.00	70.49	14,963,000
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	50,700,000	50,700,000	35,737,000	70.49	14,963,000



Sub Kegiatan Fasilitas Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	50,700,000	50,700,000	35,737,000	70.49	14,963,000
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	527,197,400	822,725,720	667,733,364.00	81.16	154,992,356
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	487,197,400	782,725,720	636,983,364	81.38	145,742,356
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	148,980,000	253,765,320	206,102,250	81.22	47,663,070
Sub Kegiatan Sandang	48,620,000	48,620,000	9,720,000	19.99	38,900,000
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	127,426,000	259,280,000	238,298,970	91.91	20,981,030
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30,556,514	30,611,514	17,391,500	56.81	13,220,014
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	24,400,000	57,680,000	56,679,200	98.26	1,000,800
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	13,800,000	13,800,000	13,780,900	99.86	19,100
Sub Kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2,380,000	2,380,000	1,120,000	47.06	1,260,000
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3,440,000	3,440,000	840,000	24.42	2,600,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	53,907,986	66,248,536	61,623,294	93.02	4,625,242
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	13,876,900	27,000,350	13,617,250	50.43	13,383,100



Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	700,000	700,000	-		700,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	19,200,000	19,200,000	17,810,000	92.76	1,390,000
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	40,000,000	40,000,000	30,750,000	76.88	9,250,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	40,000,000	40,000,000	30,750,000	76.88	9,250,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	565,140,000	1,267,565,000	1,206,619,328	95.19	60,945,672
Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	3,480,000	3,480,000	3,110,000	89.37	370,000
Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3,480,000	3,480,000	3,110,000	89.37	370,000
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	561,660,000	1,264,085,000	1,203,509,328	95.21	60,575,672
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	26,305,400	78,235,400	63,856,571	81.62	14,378,829
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	33,500,200	120,140,200	86,696,850	72.16	33,443,350
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	363,074,400	450,349,400	437,812,607	97.22	12,536,793
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	138,780,000	615,360,000	615,143,300	99.96	216,700
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	589,542,600	982,018,150	735,474,763	74.89	246,543,387
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	472,802,600	565,278,150	332,114,763	58.75	233,163,387
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	235,221,800	327,697,350	213,529,163	65.16	114,168,187
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	159,580,800	159,580,800	50,265,600	31.50	109,315,200
Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	64,800,000	64,800,000	64,100,000	98.92	700,000



Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13,200,000	13,200,000	4,220,000	31.97	8,980,000
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	116,740,000	416,740,000	403,360,000	96.79	13,380,000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	116,740,000	416,740,000	403,360,000	96.79	13,380,000
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	103,383,200	126,783,800	125,798,033.00	99.22	985,767
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	103,383,200	126,783,800	125,798,033	99.22	985,767
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	103,383,200	126,783,800	125,798,033	99.22	985,767
JUMLAH BELANJA	7,110,083,700	8,825,083,700	7,865,662,198	89.13	959,421,502

Pada Tahun 2024, Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur telah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 8.825.083.700,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.865.662.198,-. Secara kumulatif capaian kinerja anggaran pada tahun 2023 (76,77%) mengalami kenaikan dibandingkan capaian kinerja anggaran pada tahun 2024 (89,13%). Berdasarkan nilai realisasi anggaran diatas, terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai 92% dengan alasan sebagai berikut.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasi 90.03% karena Perpindahan ASN 2 (dua) orang ke Dinas Lain;

Kegiatan Administrasi Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

- Sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan, Realisasi 89,69 % disebabkan bimtek untuk jabatan fungsional Pekerja Sosial Ahli Pertama batal dilaksanakan di palangka raya;



Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor , realisasi 87,66 %, disebabkan masih ada kelebihan anggaran untuk pembelian spanduk, untuk mengeser anggaran dari sub kegiatan lain tidak bisa;
- Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Realisasi 87,32 disebabkan dikurangnya langganan koran;

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan listrik, Realisasi 74,52 % berkurangnya orang terlantar di rumah singgah dan berkurang pemakaian listrik;

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, realisasi 87,08 % disebabkan mobil dinas sosial 1 buah dilelang sehingga berkurangnya pembayaran pajak;

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk Pemulangan warga migran untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asalnya, Subkegiatan Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten /Kota untuk Pemulangan warga migran untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asalnya, Realisasi 81,22 %, disebabkan berkurangnya orang terlantar diserahkan ke Dinas Sosial Kab. Kotawaringin Timur;



PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial

- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan, Realisasi 81,22 %, disebabkan sebagian penerima manfaat tidak memenuhi kriteria penerima bansos uang permakanan dan identitas penerima bukan warga Kab. Kotim;
- Sub kegiatan Sandang, Realisasi 19,99 %, karena sebagian penerima manfaat tidak memenuhi kriteria penerima bansos sandang dan identitas penerima bukan warga Kabupaten Kotawaringin Timur.
- Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga, realisasi 56,81 %, karena berkurangnya data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) yang ditangani untuk dipulangkan ke keluarganya atau yang diberikan pelayanan sebagian dalam kota dan berkurangnya PPKS terlantar yang meninggal atau memerlukan biaya pemulasaran;
- Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak, Realisasi 47,06 % karena kurangnya pengaduan terkait permohonan fasilitasi pembuatan NIK sehingga biaya yang digunakan tidak besar dan anggaran yang diajukan diminimalkan sesuai dengan data PPKS terlantar;
- Sub Kegiatan Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar, realisasi 24,42 % , kegiatan penelusuran keluarga yang ditangani dilaksanakan di dalam kota yang tidak memakan waktu 8 jam dan biaya sehingga biaya yang digunakan tidak besar dan anggaran yang diajukan diminimalkan sesuai dengan data PPKS terlantar;
- Sub Kegiatan Pemberian Layananan Kedaruratan, realisasi 50,43 % karena Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani atau yang diberikan pelayanan sebagian dalam kota sehingga biaya yang digunakan tidak besar dan anggaran yang diajukan diminimalkan sesuai dengan data PPKS terlantar;
- Sub Kegiatan Penelusuran Keluarga, Realisasi 0 %, kegiatan penelusuran keluarga yang ditangani dilaksanakan di dalam kota yang tidak memakan waktu 8 jam dan



biaya sesuai Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;

Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial,

- Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan, realisasi 76,88 % karena tempat rujukan berobat warga tidak mampu sebagian besar di Rumah Sakit Umum Daerah Kalimantan tengah sehingga biaya akomodasi dan transportasi rujukan berobat yang diajukan tidak besar dan berkurangnya permintaan atau laporan permohonan bantuan rujukan berobat dari warga tidak mampu.

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar, Realisasi 89,19 %, karena berkurangnya kasus anak-anak terlantar.

Kegiatan Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota

- Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota, realisasi 81,62 % disebabkan kegiatan monitoring kinerja Operator DTKS Desa/Kelurahan dan SDM PKH di setiap wilayah dampingan masing-masing yang disebabkan terbentur banyaknya kegiatan lain;
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota, realisasi 72,16 %, Informasi pengusulan insentif untuk Operator DTKS Desa/Kelurahan tidak tersampaikan dengan baik dikarenakan ada beberapa wilayah sulit sinyal untuk mengakses informasi sehingga pengusulan tidak bisa 100%.



PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota

- Sub kegiatan Penyediaan Makanan , Realisasi 65,16 % , disebabkan Penanganan program bencana tidak terencana sehingga bansos,dll direalisasikan sesuai kejadian/laporan dari desa dan tidak bisa distok;
- Sub Kegiatan Sandang, realisasi 31,50 % , disebabkan Penanganan program bencana tidak terencana sehingga bansos,dll direalisasikan sesuai kejadian/laporan dari desa dan tidak bisa distok;
- Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan, Realisasi 31,97 % , disebabkan Penanganan program bencana tidak terencana sehingga bansos,dll direalisasikan sesuai kejadian/laporan dari desa dan tidak bisa distok.



C. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

NO	TUJUAN/ SASARAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PPKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	97.50	98.24	100.76	702,349,400	680,312,607	96.86	1.04
		90	84.66	94.07	50,700,000	35,737,000	70.49	1.33
		95.35	99.23	104.07	827,185,720	671,823,364	81.22	1.28
		88.59	97.2	109.72	1,379,013,750	1,097,811,484	79.61	1.38
		98.15	100	101.88	416,740,000	403,360,000	96.79	1.05
		100	100	100	126,783,800	125,798,033	99.22	1.01
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100	5,322,311,030	4,850,819,710	91.14	1.10



Tingkat Efisiensi dihitung melalui rumus : **Efisien = Output/Input**

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika Output yang dihasilkan lebih besar daripada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula tingkat efisiensi yang dicapai. Output dalam hal ini adalah persentase capaian kinerja, sedangkan inputnya adalah persentase penyerapan anggaran.

Berdasarkan Penyajian data pada Tabel 3.9 diatas, maka dapat dilakukan analisis sebagai berikut.

- a. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PPKS yang diberdayakan realisasi kinerjanya adalah 98,24% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100,76% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 96,86% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.04.
- b. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase warga negara migran yang dipulangkan realisasi kinerjanya adalah 84,66% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 94,07% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 70,49% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.33.
- c. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PPKS yang tertangani realisasi kinerjanya adalah 99,23% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 104,07% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 81,22% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.28.
- d. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial realisasi kinerjanya adalah 97,20% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 109,72% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 79,61% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.38.



- e. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase ketersediaan tenaga terampil TAGANA realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 101,88% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 96,79% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.05.
- f. Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase taman makam pahlawan yang terpelihara realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 99,22% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.01.
- g. Sasaran meningkatnya kualitas capaian kinerja perangkat daerah dalam indikator persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundangan realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar 100% dan tingkat realisasi anggaran sebesar 91,14% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1.10.

Berdasarkan hasil analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah **EFISIEN** (Jika tingkat efisiensi mencapai lebih dari atau sama dengan 1, maka efisien)

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.9

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Program dan Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI
		TARGET RENSTRA PERUBAHAN	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	PERSENTASE CAPAIAN	
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	97.5	98.24	100.76	252,980,000	243,480,000	96.24	1.05
	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	8	8	100				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	8	8	100	980,000	980,000	100	1.00
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	18	17	94				
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	17	16	94	102,000,000	92,500,000	90.69	0.96
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1	1	100	150,000,000	150,000,000	100	1.00
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	90	87	96.29	50,700,000	35,737,000	70.49	0.73



	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	45	39	86.67				
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	45	39	86.67	50,700,000	35,737,000	70.49	0.81
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	95.35	99.23	104.07	782,725,720	636,983,364	81.38	0.78
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1224	1193	97.47				
	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	845	845	100.00	253,765,320	206,102,250	81.22	0.81
	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	50	15	30.00	48,620,000	9,720,000	19.99	0.67
	Penyediaan Alat Bantu	91	91	100.00	259,280,000	238,298,970	91.91	0.92
	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	14	14	100.00	30,611,514	17,391,500	56.81	0.57
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	56	56	100.00	57,680,000	56,679,200	98.26	0.98
	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	56	56	100.00	13,800,000	13,780,900	99.86	1.00



	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	17	17	100.00	2,380,000	1,120,000	47.06	0.47
	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	32	32	100.00	3,440,000	840,000	24.42	0.24
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	40	42	105.00	66,248,536	61,623,294	93.02	0.89
	Pemberian Layanan Kedaruratan	10	11	110.00	27,000,350	13,617,250	50.43	0.46
	Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	5	6	120.00	700,000	-		
	Pemberian Layanan Rujukan	8	8	100.00	19,200,000	17,810,000	92.76	0.93
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	8	7	87.50				
	Pemberian Layanan Rujukan	8	7	87.50	40,000,000	30,750,000	76.88	0.88
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	88.59	97.20	109.72	1,267,565,000	1,206,619,328	95.19	0.87
	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	12	12	100.00				
	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	12	12	100.00	3,480,000	3,110,000	89.37	0.89
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	400	401	100.25				0.00
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	30	31	103.33	78,235,400	63,856,571	81.62	0.79
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	100	100	100.00	120,140,200	86,696,850	72.16	0.72



	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	50	50	100.00	450,349,400	437,812,607	97.22	0.97
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	220	220	100.00	615,360,000	615,143,300	99.96	1.00
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	98.15	100	101.88	982,018,150	735,474,763	74.89	0.74
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	111	107	96				
	Penyediaan Makanan	50	48	96	327,697,350	213,529,163	65.16	0.68
	Penyediaan Sandang	50	48	96	159,580,800	50,265,600	31.50	0.33
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	2	2	100	64,800,000	64,100,000	98.92	0.99
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9	9	100	13,200,000	4,220,000	31.97	0.32
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiap-siagaan Bencana Kabupaten/Kota	32	32	100				
	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	32	32	100	416,740,000	403,360,000	96.79	0.97
6	PROGRAM TAMAN MAKAM PAHLAWAN	99	100	101.01	126,783,800	125,798,033	99.22	0.98
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	2	100				
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	2	2	100	126,783,800	125,798,033	99.22	0.99
7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	100	100	5,348,816,030	4,885,084,085	91.33	0.91



Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14	14	100	145,318,400	143,904,516	99.03	0.99
Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	7	7	100	114,205,000	113,576,141	99.45	0.99
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7	7	100	31,113,400	30,328,375	97.48	0.97
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26	26	100	3,870,812,293	3,484,943,264	90.03	0.90
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	14	100	3,697,652,293	3,318,443,264	89.74	0.90
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100	173,160,000	166,500,000	96.15	0.96
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7	7	100	82,550,000	82,550,000	100.00	1.00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	7	7	100	82,550,000	82,550,000	100.00	1.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	64	63	98	425,712,707	421,030,200	98.90	1.00
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6	6	100	10,000,000	9,967,900	99.68	1.00
Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	6	6	100	12,480,000	10,940,000	87.66	0.88
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	6	6	100	15,000,000	14,883,000	99.22	0.99
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2	2	100	40,002,107	39,898,500	99.74	1.00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10	10	100	20,100,600	20,100,050	100.00	1.00



Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	14	13	93	14,000,000	12,225,000	87.32	0.94
Fasilitas Kunjungan Tamu	10	10	100	40,850,000	40,740,000	99.73	1.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	10	10	100	273,280,000	272,275,750	99.63	1.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39	37	95	574,830,180	517,238,636	89.98	0.95
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	100	4,700,000	4,700,000	100.00	1.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	11	92	64,974,720	48,422,313	74.52	0.81
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	15	14	93	505,155,460	464,116,323	91.88	0.98
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	328	327	100	223,087,450	209,707,469	94.00	0.94
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	18	16	89	83,990,000	73,134,700	87.08	0.98
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	12	12	100	79,652,450	79,651,769	100.00	1.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292	293	100	26,505,000	25,710,000	97.00	0.97
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	6	6	100	32,940,000	31,211,000	94.75	0.95



D. Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil yang telah dicapai secara keseluruhan, target sasaran dapat mencapai bahkan dapat melebihi dari target yang telah ditentukan. Hampir di setiap kegiatan, pencapaian target sasaran rata-rata 80 sampai dengan 100 keatas sebagaimana yang telah tertuang didalam pengukuran kinerja. Namun demikian, ada beberapa kegiatan yang masih belum mencapai target tapi sudah tertangani.

E. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran Belanja pada Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 berjumlah **8.825.083.700,-** yang terdiri dari Belanja Operasi **8.733.383.700,-** dan Belanja Modal **91.700.000,-**.

No	Uraian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)
1	Belanja Operasi	8.733.383.700,-	7.775.062.198,-
2	Belanja Modal	91.700.000,-	87.600.000,-



BAB IV PENUTUP

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2024 Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur 2 (dua) sasaran dengan 7 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PPKS yang diberdayakan realisasi kinerjanya adalah **98.24%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **100.76% (Kategori Sangat Tinggi)**.
- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase warga negara migran yang dipulangkan realisasi kinerjanya adalah **86.66%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **96.29% (Kategori Sangat Tinggi)**
- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PPKS yang tertangani realisasi kinerjanya adalah **99.23%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **104.07% (Kategori Sangat Tinggi)**



- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase PPKS yang memperoleh bantuan sosial realisasi kinerjanya adalah **97.20%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **109.72%** **(Kategori Sangat Tinggi)**
- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase ketersediaan tenaga terampil TAGANA realisasi kinerjanya adalah 100% dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **101.88%** **(Kategori Sangat Tinggi)**
- Sasaran Peningkatan pelayanan kepada PPKS yang memperoleh bantuan sosial dalam indikator persentase taman makam pahlawan yang terlihat realisasi kinerjanya adalah **100%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **100%** **(Kategori Sangat Tinggi)**
- Sasaran meningkatnya kualitas capaian kinerja perangkat daerah dalam indikator persentase tingkat pemenuhan komponen penunjang perangkat daerah yang sesuai ketentuan perundangan realisasi kinerjanya adalah **100%** dengan tingkat realisasi capaian kinerja sebesar **100%** **(Kategori Sangat Tinggi)**

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Dalam Tahun Anggaran 2024 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 sebesar 8.825.083.700 sedangkan realisasi anggaran mencapai 7.865.662.198,- dengan demikian dapat dikatakan tahun 2024 serapan anggaran sebesar 89.13% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 10,87%.



Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan beartispasi aktif untuk membangun Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sampit, Januari 2024

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



HAWIANAN, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP. 19680415 198911 1 001



LAMPIRAN

LKjIP

(LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAWIANAN, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.**


Jabatan : Bupati Kotawaringin Timur


Selaku atasan **Pihak Pertama** Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

H. HALIKINNOR, S.H.,M.M.

Pihak Pertama,

HAWIANAN, S.Sos
NIP.19680415 198911 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **HAWIANAN, S.Sos**
 NIP : 19680415 198911 1 001
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Utama Muda (IV/c)
 Jabatan : Kepala Dinas
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

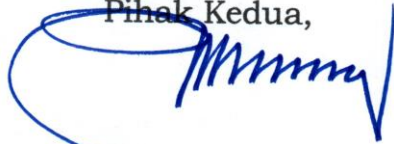
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	97,50%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90%
		Presentase PMKS yang tertangani	95,35%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	88,59%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98,15%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	100%
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%

No.	Program	Jumlah Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 5.021.140.500,-	APBD
2	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 252.980.000,-	APBD
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 50.700.000,-	APBD

5	Program Rehabilitasi Sosial	Rp.	527.197.400,-	APBD
6	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	565.140.000,-	APBD
7	Program Penanganan Bencana	Rp.	589.542.600,-	APBD
8	Program Pengelola Taman Makam Pahlawan	Rp.	103.383.200,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,



H. HALIKINNOR, SH.,MM

Pihak Pertama,



HAWIANAN, S.Sos

NIP. 19680415 198911 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **YANTINUR, S.E.,M.M.**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **HAWIANAN, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HAWIANAN, S.Sos

NIP.19680415 198911 1 001

YANTINUR, S.E., M.M.

NIP.19730901 199903 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **YANTINUR, S.E.,M.M.**
 NIP : 19730901 199903 2 005
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina Tk. I (IV/b)
 Jabatan : Sekretaris Dinas
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Presentase tingkat pemenuhan komponen penunjang Perangkat Daerah yang sesuai ketentuan perundangan	100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	Kuantitas	Persentase Pemenuhan kewajiban Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	90-100%
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah dengan ketentuan yang berlaku	90-100%
2	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan	Kuantitas	Persentase Penyelesaian Kewajiban Administrasi Keuangan	90-100%
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Pengelola Administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90-100%
3	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Organisasi	Kuantitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan dan Penyelenggara Pemerintah sesuai pedoman	90-100%

No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 5.021.140.500,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,

Sekretaris Dinas,



HAWLANAN S.Sos

NIP.19680415 198911 1 001



YANTINUR, S.E., M.M.

NIP.19730901 199903 2 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. H. YUNUS**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **HAWIANAN, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


HAWIANAN, S.Sos
NIP.19680415 198911 1 001


Drs. H. YUNUS
NIP. 19670620199403 1 012

PERJANJIAN KINERJA

**KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)**

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	90-100%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	90-100%
		Presentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	90-100%


No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 252.980.000 ,-	APBD
2.	Perlindungan dan Jaminan Sosial : Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ▪ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Rp. 138.780.000,-	APBD
3.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp. 103.383.200,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,

Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin,


HAWIANAN, S.Sos
NIP.19680415 198911 1 001


Drs. H. YUNUS
NIP. 19670620199403 1 012

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **H. Drs. YUNUS**
 NIP : 19670620199403 1 012
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(1)</i>
1	Terlaksananya Kualitas Fisik bangunan Taman Makam Pahlawan dan rasa Hormat terhadap para pejuang perintis kemerdekaan /veteran	Kuantitas	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara dan direhab bangunan fisiknya	90-100%
2	Terlaksananya Pemberian Bantuan kepada para pejuang/ Veteran	Kuantitas	Jumlah Para Pejuang Perintis Kemerdekaan /Veteran yang diberikan bantuan	90-100%
3	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS Organisasi	Kuantitas	Pelayanan yang diberikan kepada PPKS meningkat	90-100%
4	Terlaksananya Peran PSKS dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90-100%

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>
1.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp. 252.980.000,-	APBD
	Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 980.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang 	Rp. 980.000,-	APBD


	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	252.000.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota ▪ Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 	Rp.	102.000.000,-	APBD
		Rp.	150.000.000,-	APBD
2.	Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah/Kota	Rp.	138.780.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 	Rp.	138.780.000,-	APBD
3.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp.	103.383.200,-	APBD
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Rp.	103.383.200,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,

Kepala Bidang
Pemberdayaan Sosial dan
Penanganan Fakir Miskin,


HAWIANAN, S.Sos
NIP.19680415 198911 1 001


Drs. H. YUNUS
NIP. 19670620199403 1 012



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MAHMUDI, S.P**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **HAWIANAN, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

HAWIANAN, S.Sos
NIP.19680415/198911 1 001

Pihak Pertama,

MAHMUDI, S.P
NIP. 19750727 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PMKS yang tertangani	90-100%

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 527.197.400,-	APBD
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial <ul style="list-style-type: none">▪ Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Rp. 3.480.000,-	APBD

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,


HAWIANAN, S.Sos

NIP.19680415 198911 1 001

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,


MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **MAHMUDI, S.P**
 NIP : 19750727 200604 1 011
 Pangkat/Gol Ruang : Pembina (IV/a)
 Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang memperoleh bantuan	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan kreteria dari Kemensos tentang penerima bantuan	90-100%
2	Terlaksananya rehabilitasi sosial dan tuna sosial	Kuantitas	Jumlah Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	90-100%
3	Terlaksananya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan Kreteria dari Kementerian Sosial tentang Penerima Bantuan	90-100%
4	Terlaksananya Peran Pekerja Sosial dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Jumlah penyelesaian masalah/perkara yang ditangani Pekerja sosial/potensi sumber Kesejahteraan sosial	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	90-100%
5	Terlaksananya laporan rencana aksi Hak Asasi Manusia	Kuantitas	Jumlah dokomen pelaporan	90-100%
		Kualitas	kesesuaian laporan berdasar klien yang ditangani	90-100%
		Waktu	Tingkat ketepatan waktupengumpulan laporan bulanan	12 Bulan

No.	Program/ Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp. 527.197.400,-	APBD
	<p>Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp. 148.980.000,- APBD ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Rp. 48.620.000,- APBD ▪ Sub kegiatan penyediaan alat bantu Rp. 127.426.000,- APBD ▪ Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga Rp. 30.556.514,- APBD ▪ Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual dan Sosial Rp. 24.400.000,- APBD ▪ Sub kegiatan pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat Rp. 13.800.000,- APBD ▪ Sub kegiatan Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak Rp. 2.380.000,- APBD ▪ Sub kegiatan Pemberian akses kelayakan pendidikan dan kesehatan dasar Rp. 3.440.000,- APBD ▪ Sub kegiatan Pemberian layanan data dan pengaduan Rp. 53.907.986,- APBD ▪ Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan Rp. 13.786.900,- APBD ▪ Sub Kegiatan Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga Rp. 700.000,- APBD ▪ Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan Rp. 19.200.000,- APBD 		
	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS	Rp. 40.000.000,-	APBD

	dan NAPZA di Luar Panti Sosial ▪ Sub kegiatan pemberian layanan rujukan	Rp. 40.000.000,-	APBD
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 3.480.000,-	APBD
	Kegiatan : Pemeliharaan Anak-anak Terlantar	Rp. 3.480.000,-	APBD
	▪ Sub kegiatan penjangkauan anak-anak terlantar	Rp. 3.480.000,-	APBD

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,


HAWIANAN, S.Sos

NIP.19680415 198911 1 001

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,


MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **HAWIANAN, S.Sos**

Jabatan : Kepala Dinas

Selaku atasan **Pihak Pertama** selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

HAWIANAN, S.Sos
NIP.19680415 198911 1 001

M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP
NIP.19790922 199912 1 002

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Presentase PSKS yang diberdayakan	90-100%
		Presentase Warga Migran Yang dipulangkan	90-100%
		Presentase PMKS yang memperoleh Bantuan Sosial	90-100%
		Presentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	90-100%

No.	Program	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 50.700.000,-	APBD
2.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp. 422.880.000,-	APBD
3.	Program Penanganan Bencana	Rp. 589.542.600,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,


HAWIANAN, S.Sos
NIP.19680415 198911 1 001

Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial


M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP
NIP.19790922 199912 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP**
 NIP : 19790922 199912 1 002
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam/Sosial	Kuantitas	Pemberian Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Soisal	90-100%
			Tersedianya Laporan Logistik	90-100%
2	Terlaksananya Pengelolaan Data PPKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Tersedianya Data PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	90-100%
3	Terlaksananya Peran Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dan TAGANA dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	SDM PKH dan TAGANA Menerima Konsultasi dan Pembinaan	90-100%
4	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada PPKS	Kuantitas	Pemberian Layanan Langsung Kepada PPKS	90-100%

No.	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp. 50.700.000,-	APBD
	Pemulangan Warga Negara Migrain Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Rp. 50.700.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migrain Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan Asal	Rp. 50.700.000,-	APBD

2	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp.	422.880.000,-	APBD
	Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten /Kota	Rp.	422.880.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	26.305.400,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	33.500.200,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp.	363.074.400,-	APBD
3.	Program Penanganan Bencana	Rp.	589.542.600,-	APBD
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Rp.	472.802.600,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Rp.	235.221.800,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Sandang	Rp.	159.580.800,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Rp.	64.800.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Rp.	13.200.000,-	APBD
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten / Kota	Rp.	116.740.000,-	APBD
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Rp.	116.740.000,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Kepala Dinas Sosial Kab. Kotim,

Kepala Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial

HAWIANAN, S.Sos

NIP.19680415 198911 1 001

M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP

NIP.19790922 199912 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUMIDI, S.H**
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, S.P**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

SUMIDI, S.H

NIP. 19680522 199003 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SUMIDI, S.H**
 NIP : 19680522 199003 1 003
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk. (III/d)
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Muda
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial penyandang disabilitas	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan Kreteria dari Kementerian Sosial tentang Penerima Bantuan	90-100%
2	Terlaksananya laporan rencana aksi Hak Asasi Manusia	Kuantitas	Jumlah dokomen pelaporan	90-100%
		Kualitas	kesesuaian laporan berdasar klien yang ditangani	90-100%
		Waktu	Tingkat ketepatan waktupengumpulan laporan bulanan	12 Bulan

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pemberian Pelayanan Penyediaan Alat bantu	Kuantitas	Terpenuhinya pemberian pelayanan kepada PPKS yang diberikan bantuan sosial berupa alat bantu	90-100%
		Kualitas	Jumlah Penyandang Disabilitas yang diberikan alat bantu	90-100%

			Kaki palsu bawah dan atau atas lutut	
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	1 Bulan
2	Terlaksananya fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kuantitas	Terpenuhinya Pelayanan Fasilitasi Pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	90-100%
		Kualitas	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan layanan pembuatan NIK, Akta Kelahiran, dan Kartu Identitas Anak	90-100%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	1 Bulan
3	Terlaksananya Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan kesehatan dasar	Kuantitas	Terpenuhinya Pemberian Pelayanan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	90-100%
		Kualitas	Jumlah PPKS yang diberikan bantuan untuk biaya pengobatan yang tidak ditanggung oleh BPJS serta akses layanan pendidikan	90-100%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	1 Bulan
4	Terlaksananya Pemberian Layanan Reunifikasi keluarga	Kuantitas	Terpenuhinya Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	90-100%
		Kualitas	Jumlah PPKS yang dipulangkan dipertemukan dengan keluarganya	90-95%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	1 Bulan

5	Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan	Kuantitas	Terpenuhinya Pemberian Pelayanan Rujukan	Dokumen
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Laporan Bulanan berdasarkan klien yang ditangani jumlah PPKS	90-100%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	1 Bulan
6	Terlaksananya Laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	Kuantitas	Tingkat Kesesuaian Laporan Bulanan berdasarkan klien yang di tangani	90-100%
		Kualitas	Terpenuhinya Laporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia	90-100%
		Waktu	Tingkat Ketepatan waktu pengumpulan laporan bulanan	1 Bulan

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,

MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Pekerja Sosial Ahli Muda,

SUMIDI, S.H

NIP. 19680522 199003 1 003



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. YUSUF ARIF RAHMAN**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **YANTINUR, S.E., M.M.**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

YANTINUR, S.E., M.M.

NIP.19730901 199903 2 005

Pihak Pertama,

M. YUSUF ARIF RAHMAN

NIP. 19730507199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PELAPORAN
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	Kuantitas	Persentase Pemenuhan kewajiban Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	90-100%
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah dengan ketentuan yang berlaku	90-100%
2	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Organisasi	Kuantitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan dan Penyelenggara Pemerintah sesuai pedoman	90-100%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp. 5.021.140.500,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Sekretaris Dinas,

YANTINUR, S.E., M.M.
 NIP.19730901 199903 2 005

Kepala Sub Bagian
 Umum dan Pelaporan,

M. YUSUF ARIF RAHMAN
 NIP. 19730507 199403 1 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **M. YUSUF ARIF RAHMAN**
 NIP : 19730507 199403 1 010
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian dan Umum Perangkat Daerah	Kuantitas	Persentase Pelayanan Adminsitration Kepegawaian	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pelayanan Adminsitration Kepegawaian	90-100%
2	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Kuantitas	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90-100%
3	Terlaksananya Nilai Akuntabilitas	Kuantitas	Persentase Laporan akuntabilitas	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Laporan Akuntabilitas	90-100%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 31.103.400,-	APBD APBD
	▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 31.103.400,-	
2.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ▪ Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 65.510.000,-	APBD
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 244.433.779,-	APBD

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang Bangunan Kantor 	Rp. 10.000.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan kantor 	Rp. 12.480.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Peralatan Rumah Tangga 	Rp. 15.000.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Bahan Logistik Kantor 	Rp. 40.003.179,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Bahan Cetak dan Penggandaan 	Rp. 20.100.600,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 	Rp. 6.000.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu 	Rp. 40.850.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 	Rp. 100.000.000,-	APBD
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 	Rp. 490.541.028,- Rp. 6.000.000,-	APBD APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik 	Rp. 70.685.568,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Jasa Pelayanan Umum Kantor 	Rp. 413.855.460,-	APBD
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorang Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 	Rp. 244.310.000,- Rp. 52.410.000,-	APBD APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan 	Rp. 59.580.000,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 	RP. 14.000.00,-	APBD
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 	RP. 87.110.000,-	APBD

	▪ Sub Kegiatan Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gendung Kantor Atau Bangunan Lainnya	RP. 30.940.000,-	APBD
--	---	------------------	------

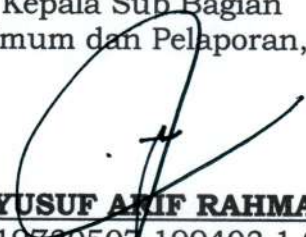
Sampit, Januari 2024

Sekretaris Dinas,



YANTINUR, S.E., M.M.
NIP.19730901 199903 2 005

Kepala Sub Bagian
Umum dan Pelaporan,



M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730507 199403 1 010



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRIANA, S.Pi, M.Pi**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **YANTINUR, S.E.,M.M.**

Jabatan : Sekretaris Dinas

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

YANTINUR, S.E.,M.M.

NIP.19730901 199903 2 005

Pihak Pertama,

APRIANA, S.Pi, M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008

PERJANJIAN KINERJA
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN
TINGKAT SATUAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (SOPD)

Satuan Organisasi Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Ketentuan	Kuantitas	Persentase Penyelesaian Kewajiban Administrasi Keuangan	90-100%
		Kualitas	Tingkat Kesesuaian Pengelola Administrasi Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	90-100%
2	Dokumen Perencanaan dan Pelaporan tersusun sesuai dengan Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Organisasi	Kuantitas	Persentase Dokumen Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah yang tersusun	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Dokumen Perencanaan, Dokumen Pelaporan dan Penyelenggara Pemerintah sesuai pedoman	90-100%

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp.	5.021.140.500,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

YANTINUR, S.E., M.M.
 NIP.19730901 199903 2 005

Pihak Pertama,

APRIANA, S.Pi, M.Pi
 NIP. 19770416 201101 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **APRIANA, S.Pi, M.Pi**
 NIP : 19770416 201101 2 008
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I/III/d
 Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	Kuantitas	Persentasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	90-100%
2	Terlaksananya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Kuantitas	Presentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	90-100%
		Kualitas	Tingkat Peresentase kesesuaian antara Dokumen Laporan pertanggungjawaban Keuangan dengan data dukung serta juknis penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan	90-100%
3	Terlaksananya Dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	Kuantitas	Tersedianya jumlah Dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	4 Dokumen
		Kualitas	Tingkat Presentase kesesuaian dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
4	Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja (Renja)	Kuantitas	Tersedianya Jumlah Dokumen (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	2 Dokumen
		Kualitas	Tingkat Presentase Dokumen (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	90-100%

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 84.990.000,-	APBD

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 	Rp.	84.990.000,-	APBD
2.	<p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ▪ Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 	Rp.	3.860.252.293,-	APBD
		Rp.	3.697.652.293,-	APBD
		Rp.	162.600.000,-	APBD

Sampit, Januari 2024

Sekretaris Dinas,

YANTINUR, S.E., M.M.
NIP.19730901 199903 2 005

Kepala Sub Bagian
Keuangan dan Perencanaan,

APRIANA, S.Pi, M.Pi
NIP. 19770416 201101 2 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **KHAIRANI, S.Pd**

Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **APRIANA, S.Pi.,M.Pi**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

APRIANA, S.Pi.,M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008

KHAIRANI, S.Pd

NIP. 19800324 200904 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **KHAIRANI, S.Pd**
 NIP : 19800324 200904 1 002
 Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
 Jabatan : Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	Kuantitas	Tersedianya jumlah Dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
		Kualitas	Tingkat Presentase kesesuaian dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
2	Terlaksananya Laporan Rencana Kerja Awal (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	Kuantitas	Tersedianya Jumlah Dokumen (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	90-100%
		Kualitas	Tingkat presentase Laporan (Renja) dan Rencana Kerja Akhir (Renja)	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	Kuantitas	Tersedianya jumlah dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
		Kualitas	Tingkat persentase kesesuaian dokumen RKA/DPA dan RKAP/DPPA	90-100%
2	Terpenuhinya laporan evaluasi renja	Kuantitas	Tersedianya laporan evaluasi renja	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase laporan evaluasi renja	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Perencanaan


APRIANA, S.Pi., M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008

Penyusun Rencana Kegiatan
dan Anggaran,



KHAIRANI, S.Pd

NIP. 19800324 200904 1 002



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos**

Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, S.P**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos

NIP. 19840419201001 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos**
 NIP : 19840419201001 2 006
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Tk.I (III/d)
 Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial dan tuna sosial	Kuantitas	Jumlah Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	terlaksananya bimbingan sosial kepada gelandangan dan pengemis	Kuantitas	Jumlah bimbingan sosial yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis	90-100%
		Kualitas	terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada gelandangan dan pengemis	90-100%
2	terlaksananya pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Kuantitas	jumlah bimbingan sosial yang di berikan kepada keluarga gelandangan dan pengemis	90-100%
		Kualitas	terpenuhinya bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	90-100%
4	terlaksananya pemberian bantuan sosial pengobatan rujukan	Kuantitas	jumlah penerima bantuan pengobatan	90-100%

5	terlaksananya pemberian bantuan sosial untuk reunifikasi keluarga	Kuantitas	jumlah orang yang menerima bantuan sosial reunifikasi keluarga	90-100%
---	---	-----------	--	---------

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,



MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial,



TIA HARTINI SUMINAR, S.Sos

NIP. 19840419201001 2 006



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BETRIANIE SASMITA, S.Hut., M.AP**

Jabatan : Analis Pelayanan Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. YUNUS**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620/199403 1 012


BETRIANIE SASMITA, S.Hut., M.AP

NIP. 19820523 200604 2 018

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **BETRIANIE SASMITA, S.Hut., M.AP**
 NIP : 19820523 200604 2 018
 Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
 Jabatan : Analis Pelayanan Sosial
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS Organisasi	Kuantitas	Pelayanan yang diberikan kepada PPKS meningkat	90-100%
2	Terlaksananya Peran PSKS dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90-100%


NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Peran PSKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Tersedianya data/Laporan Peran PSKS (Tenaga Kerja Kesejahteraan Sosial/TKSK dan Karang Taruna dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	90-100%
2	Terwujudnya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS	Kuantitas	Terlaksananya Pemberian Rekomendasi/Ijin Pengumpulan Uang-Barang kepada PPKS	90-100%
			Terlaksananya Kegiatan Penarikan Undian Kepada PPKS	90-100%

			Tersedianya Data Penerima Bantuan Non Tunai Sumber Dana APBN/APBD	90-100%
--	--	--	--	---------

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang Pemberdayaan
Sosial dan Penanganan
Fakir Miskin,

Analisis Pelayanan Sosial,



Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012



BETRIANIE SASMITA, S.Hut., M.AP

NIP. 19820523 200604 2 018



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SITI HAMISAH, S.E**

Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, S.P**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

SITI HAMISAH, S.E

NIP. 1960215 200604 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SITI HAMISAH, S.E**
 NIP : 1960215 200604 2 011
 Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/c)
 Jabatan : Analis Rehabilitasi Masalah Sosial
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

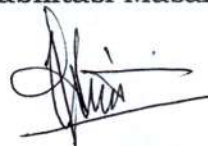
NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang memperoleh bantuan	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan kreteria dari Kemensos tentang penerima bantuan	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya pemberian layanan pendidikan dasar anak terlantar	Kualitas	Jumlah pendidikan pelatihan	90-100%
2	Terlaksananya layananan Reunifikasi anak	Kualitas	Jumlah anak yang di kembalikan kepada keluarga	90-100%
3	Terlaksananya pemberian layanan data dan pengaduan anak panti	Kualitas	Jumlah anak yang di beri pelayanan anak panti	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,

Analis Rehabilitasi Masalah Sosial,



MAHMUDI, S.P
NIP. 19750727 200604 1 011

SITI HAMISAH, S.E
NIP. 1960215 200604 2 011



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **NYAING, A.Md**

Jabatan : Analis Jaminan Sosial

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP

NIP. 19790922 199912 1 002

NYAING, A.Md

NIP.19791116 201001 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **NYAING, A.Md**
 NIP : 19791116 201001 2 005
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda Tk. I (III/b)
 Jabatan : Analis Jaminan Sosial
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam/Sosial	Kuantitas	Pemberian Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam/Soisial	90-100%
			Tersedianya Laporan Logistik	90-100%
3	Terlaksananya Peran Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dan TAGANA dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	SDM PKH dan TAGANA Menerima Konsultasi dan Pembinaan	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Pelayanan Bagi Pendamping Sosial dan Masyarakat Umum	Kuantitas	Terpenuhinya Administrasi Koordinasi/ Konsultasi Serta Pelayanan Bagi Pendamping Sosial dan Masyarakat Umum	90-100%
2	Tersedianya Bantuan Bagi Korban Bencana Alam/ Sosial	Kuantitas	Terlaksananya Koordinasi dan Penyaluran Bantuan Bagi Korban Bencana Alam/Sosial	90-100%
3	Tersedianya Surat/Dokumen dan Laporan Mutasi Barang Persediaan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	Kuantitas	Tersusunnya Administrasi Surat/Dokumen dan Laporan	90-100%

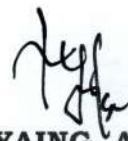
Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,



M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP
NIP. 19790922 199912 1 002

Analis Jaminan Sosial,



NYAING, A.Md
NIP.19791116 201001 2 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **WINDA LESTIANA, S.Sos**
Jabatan : Penata Laporan Keuangan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **APRIANA, S.Pi.,M.Pi**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

APRIANA, S.Pi.,M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008

WINDA LESTIANA, S.Sos

NIP. 19920914 202012 2 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **WINDA LESTIANA, S.Sos**
 NIP : 19920914 202012 2 009
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Penata Laporan Keuangan
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Terlaksananya Laporan Keuangan Yang Tepat Waktu	Kuantitas	Presentase Laporan Keuangan yang tepat waktu	90-100%
		Kualitas	Tingkat Peresentase kesesuaian antara Dokumen Laporan pertanggungjawaban Keuangan dengan data dukung serta juknis penyusun laporan pertanggungjawaban keuangan	90-100%
2	Terlaksananya Dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	Kuantitas	Tersedianya Jumlah Dokumen (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	90-100%
		Kualitas	Tingkat presentase Dokumen (Renja) dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	Kuantitas	Persentase Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Anggaran	90-100%
		Kualitas	Tingkat Presentase Laporan Realisasi Keuangan dan Fisik Anggaran	90%

2	Tersediannya Dokumen Rencana Kerja (Renja)	Kuantitas	Jumlah Dokumen Rencana Kerja (Renja) Awal dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	90-100%
		Kualitas	Tingkat Presentase Dokumen Rencana Kerja (Renja) Awal dan Rencana Kerja (Renja) Akhir	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan



APRIANA, S.Pi.,M.Pi

NIP. 19770416-201101 2 008

Penata Laporan Keuangan,



WINDA LESTIANA, S.Sos

NIP. 19920914 202012 2 009



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **TRILIANA MEISYADINI, S.E**

Jabatan : Bendahara

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **APRIANA, S.Pi.,M.Pi**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

APRIANA, S.Pi.,M.Pi

NIP. 19770416 201101 2 008

Pihak Pertama,

TRILIANA MEISYADINI, S.E

NIP. 19900518 202012 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **TRILIANA MEISYADINI, S.E**
 NIP : 19900518 202012 2 008
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Bendahara
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	Kuantitas	Persentasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terpenuhinya proses pengelolaan SPP-SPM	Kuantitas	Persentase proses pengelolaan SPP-SPM	90-100%
		Kualitas	Persentase kesesuaian juknis/aturan yang berlaku	90-100%
2	Terpenuhinya proses pembayaran terhadap bukti tagihan belanja melalui mekanisme UP/GU/LS	Kuantitas	Persentase proses pembayaran atas tagihan belanja	90-100%
		Kualitas	Persentase sesuai juknis/aturan yang berlaku	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan
dan Perencanaan

APRIANA, S.Pi., M.Pi
NIP. 19770416 201101 2 008

Bendahara,

TRILIANA MEISYADINI, S.E
NIP. 19900518 202012 2 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SOFIA ANISATUL AF'IDAH, S.Sos**

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP
NIP. 19790922 199912 1 002

Pihak Pertama,

SOFIA ANISATUL AF'IDAH, S.Sos
NIP.19940106 202203 2 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SOFIA ANISATUL AF'IDAH, S.Sos**
 NIP : 19940106 202203 2 008
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada PPKS	Kuantitas	Pemberian Layanan Langsung Kepada PPKS	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Melaksanakan kegiatan sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas dan pihak berpengaruh	Kuantitas	Terpenuhinya laporan layanan informasi bagi individu, keluarga, masyarakat dan pihak berpengaruh tentang program penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90-100%
2	Melaksanakan dan menyusun rancangan asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber	Kuantitas	Terpenuhinya dokumen asesmen masalah, kebutuhan dan sistem sumber	90-100%
3	Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang jaminan sosial	Kuantitas	Terpenuhinya laporan layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang jaminan sosial	90-100%

4	Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang perlindungan sosial	Kuantitas	Terpenuhinya laporan layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang perlindungan sosial	90-100%
---	---	-----------	--	---------

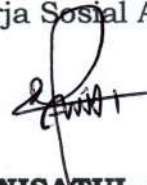
Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial,



M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP
NIP. 19790922 199912 1 002

Pekerja Sosial Ahli Pertama,



SOFIA ANISATUL AF'IDAH, S.Sos
NIP.19940106 202203 2 008



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **M. AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos**

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, S.P**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

M. AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos

NIP. 19971206 202203 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **M. AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos**
 NIP : 19971206 202203 1 005
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Peran Pekerja Sosial dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Jumlah penyelesaian masalah/perkara yang ditangani Pekerja sosial/potensi sumber Kesejahteraan sosial	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Melaksanakan penjangkauan PPKS	Kuantitas	Terlaksananya kegiatan sosialisasi program penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap individu, keluarga, kelompok sasaran, masyarakat luas dan pihak berpengaruh	90-100%
			Menyusun instrumen identifikasi awal dan seleksi	90-100%
			Terlaksananya penjangkauan calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial	90-100%
			Terlaksananya kontrak pelayanan antara pekerja sosial dengan penerima program kesejahteraan sosial	90-100%
2	Melaksanakan asesmen PPKS	Kuantitas	Menyusun instrument asesmen masalah, kebutuhan dan system sumber	90-100%

			Melaksanakan dan menyusun rancangan kegiatan asesmen, masalah kebutuhan dan system sumber	90-100%
			Menyusun rancangan kegiatan penyusunan rencana intervensi penerima program serta melaksanakan penyusunan rencana intervensi penerima program	90-100%
3	Melaksanakan intervensi/pemberian layanan kepada PPKS	Kuantitas	Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial	90-100%
4	Melaksanakan evaluasi pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada PPKS	Kuantitas	Melaksanakan kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam setting mikro	90-100%
5	Melaksanakan terminasi dan bimbingan lanjut kepada PPKS	Kuantitas	Melakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat dan pihak lainnya	90-100%
			Menyusun instrument bimbingan dan pembinaan lanjut	90-100%
			Menyusun materi bimbingan dan pembinaan lanjut	90-100%
			Melaksanakan kegiatan evaluasi program pelayanan setting mikro	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,

MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Pekerja Sosial Ahli Pertama,

M. AMRULLAH SATRIA, S.Tr.Sos

NIP. 19971206 202203 1 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos**

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP**

Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP

NIP. 19790922 199912 1 002

Pihak Pertama,

DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos

NIP.19950625 202203 2 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos**
 NIP : 19950625 202203 2 005
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pengelolaan Data PPKS dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Tersedianya Data PPKS yang Menerima Bantuan Sosial	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Memberikan Layanan Bagi Masyarakat Umum dan Penerima Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maupun Kelompok Sasaran	Kuantitas	Terpenuhinya Pemeriksaan Data Bantuan Sosial bagi Masyarakat Umum dan Penerima Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, maupun Kelompok Sasaran yang Hadir ke Dinas Sosial	90-100%
2	Mengelola Data Bantuan Sosial	Kuantitas	Terpenuhinya Penanganan Permasalahan, Verifikasi Data Bantuan Sosial	90-100%
			Terpenuhinya Finalisasi dan Pengesahan Usulan Calon Penerima Bantuan Sosial	90-100%
3	Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi dan Koordinasi Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial terhadap Individu, Kelompok Sasaran, Masyarakat Luas, dan Pihak Berpengaruh	Kuantitas	Terpenuhinya Surat/Dokumen/Laporan Sebagai Bahan Koordinasi Data Bantuan Sosial	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,



M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP
NIP. 19790922 199912 1 002

Pekerja Sosial Ahli Pertama,



DEVI HARFIZA, S.Tr.Sos
NIP.19950625 202203 2 005



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **BENEDIKTA WINA MAHARANI, S.Tr.Sos**

Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. YUNUS**

Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

H. Drs. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

BENEDIKTA WINA M., S.Tr.Sos

NIP.19980616 202203 2 006

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **BENEDIKTA WINA MAHARANI, S.Tr.Sos**
 NIP : 19980616 202203 2 006
 Pangkat/Gol Ruang : Penata (III/a)
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS	Kuantitas	Pelayanan yang diberikan kepada PPKS meningkat	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Ziarah Nasional dan Ziarah Rombongan	Kuantitas	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Ziarah Rombongan dan Ziarah Nasional	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian sarana dan prasarana bagi Ziarah Nasional dan Rombongan	90-100%
2	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan yang Bersih dan Indah	Kuantitas	Terpenuhinya Taman Makam Pahlawan yang Bersih dan Indah	90-100%
		Kualitas	Menjaga Kebersihan dan Keindahan Taman Makam Pahlawan	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,

Pekerja Sosial Ahli Pertama,

H. Drs. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012



BENEDIKTA WINA M., S.Tr.Sos

NIP.19980616 202203 2 006



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUPARNO**
Jabatan : Pengelola Pembinaan Bantuan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. YUNUS**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

SUPARNO

NIP.19720403 200604 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH**

Nama : **SUPARNO**
 NIP : 19720403 200604 1 013
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pengelola Pembinaan Bantuan
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Peran PSKS dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terkelolanya Data Pembinaan Bantuan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Kuantitas	Tersedianya Laporan/Data Pembinaan Bantuan	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin,


Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

Pengelola Pembinaan Bantuan,



SUPARNO

NIP.19720403 200604 1 013



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUPRIADY, S.A.P**

Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **M. YUSUF ARIF RAHMAN**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,


M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730305 199403 1 010


SUPRIADY, S.A.P
NIP. 19730604 200701 1 019

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **SUPRIADY, S.A.P**
 NIP : 19730604 200701 1 019
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Kuantitas	Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pelayanan Administrasi Umum	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tersedianya Administrasi Barang dan Aset yang terinventarisasi dengan baik	Kuantitas	Persentasi barang milik daerah yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Sistem Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Buku Inventaris (BI)	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Buku Inventaris (BI)	90-100%
2	Tersedianya Rekon aset Melalui barang pakai habis dan Pengadaan barang milik daerah	Kuantitas	Persentase Laporan Rekon Barang Pakai Habis dan peralatan kantor yang diadakan	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Kondisi fisik perabot kantor yang diadakan	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Sub Bagian Umum
Dan Pelaporan

M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730305 199403 1 010

Pengelola Pemanfaatan
Barang Milik Daerah,

SUPRIADY, S.A.P
NIP. 19730604 200701 1 019



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DASEP HIDAYAT**
Jabatan : Pranata Taman Makam Pahlawan
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **Drs. H. YUNUS**
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
Miskin

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

DASEP HIIDAYAT

NIP.19681217 200701 1 014

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **DASEP HIDAYAT**
 NIP : 19681217 200701 1 014
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Pranata Taman Makam Pahlawan
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial pada PPKS	Kuantitas	Pelayanan yang diberikan kepada PPKS meningkat	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Ziarah Nasional dan Ziarah Rombongan	Kuantitas	Tersedianya Sarana dan Prasarana bagi Ziarah Rombongan dan Ziarah Nasional	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian sarana dan prasarana bagi Ziarah Nasional dan Rombongan	90-100%
2	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan yang Bersih dan Indah	Kuantitas	Terpenuhinya Taman Makam Pahlawan yang Bersih dan Indah	90-100%
		Kualitas	Menjaga Kebersihan dan Keindahan Taman Makam Pahlawan	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Bidang Pemberdayaan
 Sosial dan Penanganan
 Fakir Miskin,


Drs. H. YUNUS

NIP. 19670620 199403 1 012

Pranata Taman
 Makam Pahlawan,


DASEP HIDAYAT

NIP.19681217 200701 1 014



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AI PATIMAH**

Jabatan : Verifikator Keuangan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **APRIANA, S.Pi.,M.Pi**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, Januari 2024

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

APRIANA, S.Pi.,M.Pi

AI PATIMAH

NIP. 19770416 201101 2 008

NIP. 19710614 200904 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **AI PATIMAH**
 NIP : 19710614 200904 2 001
 Pangkat/Gol Ruang : Pengatur (II/c)
 Jabatan : Verifikator Keuangan
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	Kuantitas	Persentasi Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Pengelolaan Administrasi Keuangan Dinas	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
1	Terverifikasinya Berkas SPJ sesuai Ketentuan berlaku	Kuantitas	Terpenuhinya Berkas SPJ dan Bukti-bukti hasil Verifikasi yang akan di bayarkan	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Berkas SPJ dan Bukti-bukti hasil Verifikasi yang akan di bayarkan	90-100%
2	Tersedianya Rekapitulasi SPJ-an Belanja sesuai ketentuan berlaku	Kuantitas	Tersedianya Rekapitulasi SPJ-an Belanja yang telah di bayarkan	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Rekapitulasi SPJ-an Belanja yang telah di bayarkan dengan berkas SPJ-annya	90-100%

Sampit, Januari 2024

Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

Verifikator Keuangan,

APRIANA, S.Pi., M.Pi

AI PATIMAH

NIP. 19770416 201101 2 008

NIP. 19710614 200904 2 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **AGUS WARDANA**
Jabatan : Pengelola Kesejahteraan Sosial
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MUHAMMAD FAHRIZAL RAHMANI, S.STP**
Jabatan : Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, April 2024

Pihak Kedua,

M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP
NIP. 19790922 199912 1 002

Pihak Pertama,

AGUS WARDANA
NIP.19760814 199902 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **AGUS WARDANA**
NIP : 19760814 199902 1 001
Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda/ III a
Jabatan : Pengelola Kesejahteraan Sosial
Perangkat Daerah : Dinas Sosial
Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3	Terlaksananya Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada PPKS	Kuantitas	Pemberian Layanan Langsung Kepada PPKS	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksana Pelayanan Kesejahteraan Sosial Pada Orang Terlantar	Kuantitas	Pemberian layanan kepada Orang Terlantar	20
2	Terlaksananya Pengelolaan Data PPKS pada orang terlantar	Kuantitas	Tersedianya Data PPKS Info	10
3	Terlaksananya peran Sumber Daya Manusia (SDM) PKH dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	SDM PKH konsultasi dan pembinaan	5
4	Terlaksana Pelayanan Penanggulangan Bencana alam	Kuantitas	Terlaksana penyaluran bantuan bencana banjir dan tagana	10

Sampit, April 2024

Kepala Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial,



M. FAHRIZAL RAHMANI, S.STP
NIP. 19790922 199912 1 002

Analisis Jaminan Sosial,



AGUS WARDANA
NIP. 19760814 199902 1 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAYATUN NISSA KUSUMAWARDANI, S.Psi**

Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **M. YUSUF ARIF RAHMAN**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Pelaporan

Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, April 2024

Pihak Kedua,

M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730507 199403 1 010

Pihak Pertama,

HAYATUN NISSA KUSUMAWARDANI, S.Psi
NIP. 19960108 202012 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **HAYATUN NISSA KUSUMAWARDANI, S.Psi**
 NIP : 19960108 202012 2 011
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda (III/a)
 Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terlaksananya Nilai AKuntabilitas	Kuantitas	Persentase Laporan Akuntabilitas	90-100%
		Kualitas	Tingkat Persentase Laporan Akuntabilitas	90-100%

NO	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terpenuhinya Laporan SAKIP	Kuantitas	Jumlah laporan yang di selesaikan	5 Laporan
		Kualitas	Persentase laporan yang di selesaikan	90-100%
2	Terpenuhinya DOkumen Pelaporan	Kuantitas	Jumlah laporan yang di selesaikan	5 Laporan
		Kualitas	Persentase laporan yang di selesaikan	90-100%

Sampit, April 2024

Kepala Sub Bagian Umum
Dan Pelaporan

M. YUSUF ARIF RAHMAN
NIP. 19730305 199403 1 010

Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan,

HAYATUN NISSA KUSUMAWARDANI, S.Psi
NIP. 19960108 202012 2 001



PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **APRIN TUNASDA, S.Tr.Sos**
Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**

Nama : **MAHMUDI, S.P**
Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Selaku atasan Pihak Pertama selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab **Pihak Pertama**.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sampit, April 2024

Pihak Kedua,

MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Pihak Pertama,

APRIN TUNASDA, S.Tr.Sos

NIP. 19990413 202421 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
TINGKAT SATUAN PERANGKAT DAERAH

Nama : **APRIN TUNASDA, S.Tr.Sos**
 NIP : 19990413 202421 1 004
 Pangkat/Gol Ruang : Penata Muda/ IX
 Jabatan : Pekerja Sosial Ahli Pertama
 Perangkat Daerah : Dinas Sosial
 Tahun Anggaran : 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	ASPEK	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN
1	Terlaksananya rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia	Kuantitas	Jumlah rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia yang memperoleh bantuan	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian data realisasi dengan kriteria dari Kemensos tentang penerima bantuan	90-100%
2	Terlaksananya rehabilitasi sosial dan tuna sosial	Kuantitas	Jumlah Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial	90-100%
		Kualitas	Kesesuaian Data Realisasi dengan Pengaduan masyarakat	90-100%

No	SASARAN KEGIATAN	ASPEK	SASARAN KEGIATAN INDIVIDU	TARGET TAHUNAN
1	Melaksanakan penjangkauan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Terlaksananya penjangkauan calon penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial	9
2	Melaksanakan asesmen kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Kuantitas	Melaksanakan dan menyusun rancangan kegiatan asesmen, masalah, kebutuhan dan sistem sumber	9
3	Melaksanakan intervensi/pemberian layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Kuantitas	Melaksanakan kegiatan pemberian layanan bagi penerima program penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam bidang rehabilitasi sosial	9
4	Melaksanakan evaluasi pelayanan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Kuantitas	Melaksanakan kegiatan evaluasi pemberian layanan bagi penerima program dalam setting mikro	9

5	Melaksanakan terminasi dan bimbingan lanjut kepada pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Kuantitas	Melakukan kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut dalam keluarga, masyarakat dan pihak lainnya	9
---	---	-----------	--	---

Sampit, April 2024

Kepala Bidang
Rehabilitasi Sosial,



MAHMUDI, S.P

NIP. 19750727 200604 1 011

Pekerja Sosial Ahli Pertama,



APRIN TUNASDA, S.Tr.Sos

NIP. 19990413 202421 1 004

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TA. 2024
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024 (PERUBAHAN)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan	Persentase PSKS Yang Diberdayakan	97,50
		Persentase Warga Migran Yang Dipulangkan	90
		Persentase PMKS yang Tertangani	95,35
		Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	88,59
		Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA	98,15
		Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terpelihara	100
2	Meningkatnya Kualitas Capaian Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tingkat Pemenuhan Kompenen Penunjang Perangkat Daerah Yang Sesuai Ketentuan Perundangan	100

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR



HAYWANAN, S.Sos
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680415 198911 1 001

Tabel T.C-25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatkan Kualitas dan Jangkauan Pelayanan Kepada PMKS	Peningkatan Pelayanan Kepada PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial	Persentase PMKS yang diberdayakan	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37
			Persentase Warga Migran yang dipulangkan	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,99
			Persentase PMKS yang tertangani	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05
			Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	93,59
			Persentase Ketersediaan Tenaga terampil tagana	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07
			Persentase Taman Makam Pahlawan yang terpelihara	70,91	75,91	80,91	85,91	90,91	95,91

Keterangan

(2) : Diisi dengan tujuan Perangkat Daerah

(3) : Diisi dengan sasaran Perangkat Daerah

Tabel T.C-28
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase PMKS yang diberdayakan	55,37	61,37	67,37	73,37	79,37	85,37	91,37	91,37
2	Persentase PMKS yang tertangani	65,05	70,05	75,05	80,05	85,05	90,05	95,05	95,05
3	Persentase Warga Migran yang dipulangkan	64,93	69,93	74,93	79,93	84,93	89,93	94,93	94,93
4	Persentase Ketersediaan Tenaga Terampil Tagana	22,07	34,07	46,07	58,07	70,07	82,07	94,07	94,07
5.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan	68,59	73,59	78,59	83,59	88,59	93,59	98,59	94,93

TABEL 1.1
LAPORAN REALISASI KEUANGAN DAN FISIK APBD (PERUBAHAN)
DINAS SOSIAL Per 31 Desember 2024

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)		
				BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	FISIK (%)	(Rp)		(%)	
2	3	4	5	6	7=6/3*100	8	9	10=9/4*100	11	12=6+9	13=12/5*100	14	15=5-12
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH													
URUSAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL	8,733,383,700	91,700,000	8,825,083,700	-			-			-	-	-	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,322,311,030	-	5,322,311,030	4,850,819,710	91.14	100,00				4,850,819,710.00	91.14	100,00	471,491,320
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145,318,400	-	145,318,400	143,904,516	99.03	100,00	-			143,904,516	99.03	100,00	1,413,884
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA_SKPD	114,205,000	-	114,205,000	113,576,141	99.45	100,00	-	-	-	113,576,141	99.45	100,00	628,859
Belanja Barang dan Jasa	114,205,000	-	114,205,000	113,576,141	99.45	100,00	-	-	-	113,576,141	99.45	100,00	628,859
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	110,160,000	-	110,160,000	109,829,141	99.70	100,00	-	-	-	109,829,141	99.70	100,00	330,859
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,045,000	-	4,045,000	3,747,000	92.63	100,00	-	-	-	3,747,000	92.63	100,00	298,000
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	31,113,400	-	31,113,400	30,328,375	97.48	100,00	-	-	-	30,328,375	97.48	100,00	785,025
Belanja Barang dan Jasa	31,113,400	-	31,113,400	30,328,375	97.48	100,00	-	-	-	30,328,375	97.48	100,00	785,025
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	31,113,400	-	31,113,400	30,328,375	97.48	100,00	-	-	-	30,328,375	97.48	100,00	785,025
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,870,812,293	-	3,870,812,293	3,484,943,264	90.03	100,00	-	-	-	3,484,943,264	90.03	100,00	385,869,029
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,697,652,293	-	3,697,652,293	3,318,443,264	89.74	100,00	-	-	-	3,318,443,264	89.74	100,00	379,209,029
Belanja Pegawai	3,697,652,293	-	3,697,652,293	3,318,443,264	89.74	100,00	-	-	-	3,318,443,264	89.74	100,00	379,209,029
Belanja Gaji Pokok PNS	1,448,949,969	-	1,448,949,969	1,385,884,378	95.65	100,00	-	-	-	1,385,884,378	95.65	100,00	63,065,591
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	123,500,000	-	123,500,000	97,245,428	78.74	100,00	-	-	-	97,245,428	78.74	100,00	26,254,572
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	142,500,000	-	142,500,000	102,270,000	71.77	100,00	-	-	-	102,270,000	71.77	100,00	40,230,000
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	71,000,000	-	71,000,000	34,675,000	48.84	100,00	-	-	-	34,675,000	48.84	100,00	36,325,000
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	48,040,000	-	48,040,000	31,195,000	64.94	100,00	-	-	-	31,195,000	64.94	100,00	16,845,000
Belanja Tunjangan Beras PNS	84,200,000	-	84,200,000	57,356,640	68.12	100,00	-	-	-	57,356,640	68.12	100,00	26,843,360
Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PNS	30,700,000	-	30,700,000	16,118,905	52.50	100,00	-	-	-	16,118,905	52.50	100,00	14,581,095
Belanja Pembulatan Gaji PNS	870,759	-	870,759	20,397	2.34	100,00	-	-	-	20,397	2.34	100,00	850,362
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	119,252,465	-	119,252,465	56,581,305	47.45	100,00	-	-	-	56,581,305	47.45	100,00	62,671,160
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	11,700,000	-	11,700,000	2,848,822	24.35	100,00	-	-	-	2,848,822	24.35	100,00	8,851,178
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12,692,200	-	12,692,200	8,546,591	67.34	100,00	-	-	-	8,546,591	67.34	100,00	4,145,609
Belanja Gaji Pokok PPPK	40,806,108	-	40,806,108	28,832,400	70.66	100,00	-	-	-	28,832,400	70.66	100,00	11,973,708
Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	7,637,696	-	7,637,696	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,637,696
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6,140,000	-	6,140,000	3,000,000	48.86	100,00	-	-	-	3,000,000	48.86	100,00	3,140,000
Belanja Tunjangan Beras PPPK	5,555,520	-	5,555,520	724,200	13.04	100,00	-	-	-	724,200	13.04	100,00	4,831,320
Belanja Tunjangan Pph/Tunjangan Khusus PPPK	500,000	-	500,000	89,786	17.96	100,00	-	-	-	89,786	17.96	100,00	410,214
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	510,698	-	510,698	377	0.07	100,00	-	-	-	377	0.07	100,00	510,321
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3,191,568	-	3,191,568	1,261,296	39.52	100,00	-	-	-	1,261,296	39.52	100,00	1,930,272
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	310,740	-	310,740	69,201	22.27	100,00	-	-	-	69,201	22.27	100,00	241,539
Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	687,470	-	687,470	207,594	30.20	100,00	-	-	-	207,594	30.20	100,00	479,876
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1,500,000,000	-	1,500,000,000	1,456,114,938	97.07	100,00	-	-	-	1,456,114,938	97.07	100,00	43,885,062
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	38,907,100	-	38,907,100	35,401,006	90.99	100,00	-	-	-	35,401,006	90.99	100,00	3,506,094

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)		
				BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	FISIK (%)	(Rp)		(%)	
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	173,160,000	-	173,160,000	166,500,000	96.15	100,00	-	-	-	166,500,000	96.15	100,00	6,660,000
Belanja Pegawai	168,960,000	-	168,960,000	162,300,000	96.06	100,00	-	-	-	162,300,000	96.06	100,00	6,660,000
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	154,920,000	-	154,920,000	148,260,000	95.70	100,00	-	-	-	148,260,000	95.70	100,00	6,660,000
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	14,040,000	-	14,040,000	14,040,000	100.00	100,00	-	-	-	14,040,000	100.00	100,00	-
Belanja Barang Jasa	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	100.00	100,00	-	-	-	4,200,000	100.00	51.00	-
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	4,200,000	-	4,200,000	4,200,000	100.00	100,00	-	-	-	4,200,000	100.00	100,00	-
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82,550,000	-	82,550,000	73,995,625	89.64	100,00	-	-	-	73,995,625	89.64	100,00	8,554,375
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	82,550,000	-	82,550,000	73,995,625	89.64	100,00	-	-	-	73,995,625	89.64	100,00	8,554,375
Belanja Barang Jasa	82,550,000	-	82,550,000	73,995,625	89.64	100,00	-	-	-	73,995,625	89.64	100,00	8,554,375
Belanja Bimbingan Teknis	42,000,000	-	42,000,000	38,075,000	90.65	100,00	-	-	-	38,075,000	90.65	100,00	3,925,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40,550,000	-	40,550,000	35,920,625	88.58	100,00	-	-	-	35,920,625	88.58	100,00	4,629,375
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	425,712,707	-	425,712,707	421,030,200	98.90	100,00	-	-	-	421,030,200	98.90	100,00	4,682,507
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10,000,000	-	10,000,000	9,967,900	99.68	100,00	-	-	-	9,967,900	99.68	100,00	32,100
Belanja Barang dan Jasa	10,000,000	-	10,000,000	9,967,900	99.68	100,00	-	-	-	9,967,900	99.68	100,00	32,100
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	10,000,000	-	10,000,000	9,967,900	99.68	100,00	-	-	-	9,967,900	99.68	100,00	32,100
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12,480,000	-	12,480,000	10,940,000	87.66	100,00	-	-	-	10,940,000	87.66	100,00	1,540,000
Belanja Barang dan Jasa	12,480,000	-	12,480,000	10,940,000	87.66	100,00	-	-	-	10,940,000	87.66	100,00	1,540,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Kantor	7,056,000	-	7,056,000	5,555,000	78.73	100,00	-	-	-	5,555,000	78.73	100,00	1,501,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	5,424,000	-	5,424,000	5,385,000	99.28	100,00	-	-	-	5,385,000	99.28	0.00	39,000
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15,000,000	-	15,000,000	14,883,000	99.22	100,00	-	-	-	14,883,000	99.22	100,00	117,000
Belanja Barang Jasa	15,000,000	-	15,000,000	14,883,000	99.22	100,00	-	-	-	14,883,000	99.22	100,00	117,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	15,000,000	-	15,000,000	14,883,000	99.22	100,00	-	-	-	14,883,000	99.22	100,00	117,000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	40,002,107	-	40,002,107	39,898,500	99.74	100,00	-	-	-	39,898,500	99.74	100,00	103,607
Belanja Barang Jasa	40,002,107	-	40,002,107	39,898,500	99.74	100,00	-	-	-	39,898,500	99.74	100,00	103,607
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	11,313,065	-	11,313,065	11,265,000	99.58	100,00	-	-	-	11,265,000	99.58	100,00	48,065
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	21,105,522	-	21,105,522	21,064,500	99.81	100,00	-	-	-	21,064,500	99.81	100,00	41,022
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7,583,520	-	7,583,520	7,569,000	99.81	100,00	-	-	-	7,569,000	99.81	100,00	14,520
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	20,100,600	-	20,100,600	20,100,050	100.00	100,00	-	-	-	20,100,050	100.00	100,00	550
Belanja Barang Jasa	20,100,600	-	20,100,600	20,100,050	87.32	100,00	-	-	-	20,100,050	100.00	100,00	550
Belanja Bahan/Alat untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	20,100,600	-	20,100,600	20,100,050	100.00	100,00	-	-	-	20,100,050	100.00	100,00	550
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	14,000,000	-	14,000,000	12,225,000	87.32	100,00	-	-	-	12,225,000	87.32	100,00	1,775,000
Belanja Barang Jasa	14,000,000	-	14,000,000	12,225,000	87.32	100,00	-	-	-	12,225,000	87.32	100,00	1,775,000
Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	5,000,000	-	5,000,000	5,000,000	100.00	100,00	-	-	-	5,000,000	100.00	100,00	-
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	9,000,000	-	9,000,000	7,225,000	80.28	100,00	-	-	-	7,225,000	80.28	100,00	1,775,000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI					TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)		
				BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	FISIK (%)	(Rp)			(%)
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	40,850,000	-	40,850,000	40,740,000	99.73	100.00	-	-	-	40,740,000	99.73	100.00	110,000
Belanja Barang Jasa	40,850,000	-	40,850,000	40,740,000	99.73	100.00	-	-	-	40,740,000	99.73	100.00	110,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	20,105,000	-	20,105,000	20,087,500	99.91	100.00	-	-	-	20,087,500	99.91	100.00	17,500
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9,000,000	-	9,000,000	8,947,500	99.42	100.00	-	-	-	8,947,500	99.42	100.00	52,500
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	11,745,000	-	11,745,000	11,705,000	99.66	100.00	-	-	-	11,705,000	99.66	100.00	40,000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	273,280,000	-	273,280,000	272,275,750	99.63	100.00	-	-	-	272,275,750	99.63	100.00	1,004,250
Belanja Barang Jasa	273,280,000	-	273,280,000	272,275,750	99.63	100.00	-	-	-	272,275,750	99.63	100.00	1,004,250
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	266,140,000	-	266,140,000	265,309,750	99.69	100.00	-	-	-	265,309,750	99.69	100.00	830,250
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,140,000	-	7,140,000	6,966,000	97.56	100.00	-	-	-	6,966,000	97.56	100.00	174,000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	574,830,180	-	574,830,180	517,238,636	89.98	100.00	-	-	-	517,238,636	89.98	100.00	57,591,544
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,700,000	-	4,700,000	4,700,000	100.00	100.00	-	-	-	4,700,000	100.00	100.00	-
Belanja Barang Jasa	4,700,000	-	4,700,000	4,700,000	100.00	100.00	-	-	-	4,700,000	100.00	100.00	-
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	4,700,000	-	4,700,000	4,700,000	100.00	100.00	-	-	-	4,700,000	100.00	100.00	-
Sub Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	64,974,720	-	64,974,720	48,422,313	74.52	100.00	-	-	-	48,422,313	74.52	100.00	16,552,407
Belanja Barang Jasa	64,974,720	-	64,974,720	48,422,313	74.52	100.00	-	-	-	48,422,313	74.52	100.00	16,552,407
Belanja Tagihan Air	9,300,000	-	9,300,000	1,946,750	20.93	100.00	-	-	-	1,946,750	20.93	100.00	7,353,250
Belanja Tagihan Listrik	43,074,720	-	43,074,720	36,543,253	84.84	100.00	-	-	-	36,543,253	84.84	100.00	6,531,467
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	12,600,000	-	12,600,000	9,932,310	78.83	100.00	-	-	-	9,932,310	78.83	100.00	2,667,690
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	505,155,460	-	505,155,460	464,116,323	91.88	100.00	-	-	-	464,116,323	91.88	100.00	41,039,137
Belanja Barang Jasa	505,155,460	-	505,155,460	464,116,323	91.88	100.00	-	-	-	464,116,323	91.88	100.00	41,039,137
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,432	-	1,432	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,432
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor kertas dan cover	8,064,600	-	8,064,600	7,974,000	98.88	100.00	-	-	-	7,974,000	98.88	100.00	90,600
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor Lainnya	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	100.00	100.00	-	-	-	4,000,000	100.00	100.00	-
Belanja Pakaian Olahraga	8,000,000	-	8,000,000	8,000,000	100.00	100.00	-	-	-	8,000,000	100.00	100.00	-
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	225,891,432	-	225,891,432	200,792,384	88.89	100.00	-	-	-	200,792,384	88.89	100.00	25,099,048
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	109,429,208	-	109,429,208	107,420,954	98.16	100.00	-	-	-	107,420,954	98.16	100.00	2,008,254
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	71,899,048	-	71,899,048	67,099,048	93.32	100.00	-	-	-	67,099,048	93.32	100.00	4,800,000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	18,000,000	-	18,000,000	18,000,000	100.00	100.00	-	-	-	18,000,000	100.00	100.00	-
Belanja Medical Check Up	4,800,000	-	4,800,000	4,560,000	95.00	100.00	-	-	-	4,560,000	95.00	100.00	240,000
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Non ASN	29,392,740	-	29,392,740	25,963,587	88.33	100.00	-	-	-	25,963,587	88.33	100.00	3,429,153
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Bagi Non ASN	1,413,000	-	1,413,000	1,248,150	88.33	100.00	-	-	-	1,248,150	88.33	100.00	164,850
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1,764,000	-	1,764,000	1,558,200	88.33	100.00	-	-	-	1,558,200	88.33	100.00	205,800
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	22,500,000	-	22,500,000	17,500,000	77.78	100.00	-	-	-	17,500,000	77.78	100.00	5,000,000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	223,087,450	-	223,087,450	209,707,469	94.00	100.00	-	-	-	209,707,469	94.00	100.00	13,379,981
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	83,990,000	-	83,990,000	73,134,700	87.08	100.00	-	-	-	73,134,700	87.08	100.00	10,855,300
Belanja Barang Jasa	83,990,000	-	83,990,000	73,134,700	87.08	100.00	-	-	-	73,134,700	87.08	100.00	10,855,300

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)		
				BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	FISIK (%)	(Rp)		(%)	
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	9,000,000	-	9,000,000	8,295,000	92.17	100,00				8,295,000	92.17	100,00	705,000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan	16,700,000	-	16,700,000	6,574,200	39.37	100,00				6,574,200	39.37	100,00	10,125,800
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	58,290,000	-	58,290,000	58,265,500	99.96	100,00				58,265,500	99.96	100,00	24,500
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,652,450	-	79,652,450	79,651,769	100.00	100,00				79,651,769	100.00	100,00	681
Belanja Barang Jasa	79,652,450	-	79,652,450	79,651,769	100.00	100,00				79,651,769	100.00	100,00	681
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	79,652,450	-	79,652,450	79,651,769	100.00	100,00				79,651,769	100.00	100,00	681
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor	26,505,000	-	26,505,000	25,710,000	97.00	100,00	-	-	-	25,710,000	97.00	100,00	795,000
Belanja Barang Jasa	26,505,000	-	26,505,000	25,710,000	97.00	100,00	-	-	-	25,710,000	97.00	100,00	795,000
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung -Bangunan Gesung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	26,505,000	-	26,505,000	25,710,000	97.00	100,00	-	-	-	25,710,000	97.00	100,00	795,000
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan	32,940,000	-	32,940,000	31,211,000	94.75	100,00	-	-	-	31,211,000	94.75	100,00	1,729,000
Belanja Barang Jasa	32,940,000	-	32,940,000	31,211,000	94.75	100,00	-	-	-	31,211,000	94.75	100,00	1,729,000
Belanja Bahan-Bahan Kimia	2,000,000	-	2,000,000	1,958,000	97.90	100,00				1,958,000	97.90	100,00	42,000
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3,700,000	-	3,700,000	3,673,000	99.27	100,00				3,673,000	99.27	100,00	27,000
Belanja Jasa Pengolahan Sampah	4,500,000	-	4,500,000	3,000,000	66.67	100,00				3,000,000	66.67	100,00	1,500,000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8,540,000	-	8,540,000	8,500,000	99.53	100,00				8,500,000	99.53	100,00	40,000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	7,300,000	-	7,300,000	7,300,000	100.00	100,00				7,300,000	100.00	100,00	-
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Komputer	6,900,000	-	6,900,000	6,780,000	98.26	100,00				6,780,000	98.26	100,00	120,000
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	252,980,000	-	252,980,000	243,480,000	96.24	100,00				243,480,000	96.24	100,00	9,500,000
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	980,000	-	980,000	980,000	100.00	100,00	-	-	-	980,000	100.00	100,00	-
Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	980,000	-	980,000	980,000	100.00	100,00	-	-	-	980,000	100.00	100,00	-
Belanja Barang Jasa	980,000	-	980,000	980,000	100.00	100,00	-	-	-	980,000	100.00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	980,000	-	980,000	980,000	100.00	100,00				980,000	100.00	100,00	-
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	252,000,000	-	252,000,000	242,500,000	96.23	100,00				242,500,000	96.23	100,00	9,500,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	102,000,000	-	102,000,000	92,500,000	90.69	100,00	-	-	-	92,500,000	90.69	100,00	9,500,000
Belanja Barang Jasa	102,000,000	-	102,000,000	92,500,000	90.69	100,00	-	-	-	92,500,000	90.69	100,00	9,500,000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	102,000,000	-	102,000,000	92,500,000	90.69	100,00				92,500,000	90.69	100,00	9,500,000
Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	100.00	100,00	-	-	-	150,000,000	100.00	100,00	-
Belanja Hibah	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	100.00	100,00	-	-	-	150,000,000	100.00	100,00	-
Belanja Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	150,000,000	-	150,000,000	150,000,000	100.00	100,00				150,000,000	100.00	100,00	-

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		FISIK (%)	
				BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)		(Rp)	(%)		
Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan Kepada Individu	227,500,000	-	227,500,000	209,800,000	92.22	100,00	-	-	-	209,800,000	92.22	100,00	17,700,000
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	30,611,514	-	30,611,514	17,391,500	56.81	100,00				17,391,500	56.81	100,00	13,220,014
Belanja Barang Jasa	5,520,000	-	5,520,000	4,941,500	89.52	100,00	-	-	-	4,941,500	89.52	100,00	578,500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,520,000	-	5,520,000	4,941,500	89.52	100,00	-	-	-	4,941,500	89.52	100,00	578,500
Belanja Bantuan Sosial	25,091,514	-	25,091,514	12,450,000	49.62	100,00				12,450,000	49.62	100,00	12,641,514
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	25,091,514	-	25,091,514	12,450,000	49.62	100,00	-	-	-	12,450,000	49.62	100,00	12,641,514
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	57,680,000	-	57,680,000	56,679,200	98.26	100,00	-	-	-	56,679,200	98.26	100,00	1,000,800
Belanja Barang Jasa	57,680,000	-	57,680,000	56,679,200	98.26	100,00	-	-	-	56,679,200	98.26	100,00	1,000,800
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	15,600,000	-	15,600,000	15,177,500	97.29	100,00	-	-	-	15,177,500	97.29	100,00	422,500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28,080,000	-	28,080,000	27,571,700	98.19	100,00	-	-	-	27,571,700	98.19	100,00	508,300
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	14,000,000	-	14,000,000	13,930,000	99.50	100,00	-	-	-	13,930,000	99.50	100,00	70,000
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	13,800,000	-	13,800,000	13,780,900	99.86	100,00				13,780,900	99.86	100,00	19,100
Belanja Barang Jasa	13,800,000	-	13,800,000	13,780,900	99.86	100,00	-	-	-	13,780,900	99.86	100,00	19,100
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,800,000	-	13,800,000	13,780,900	99.86	100,00	-	-	-	13,780,900	99.86	100,00	19,100
Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	2,380,000	-	2,380,000	1,120,000	47.06	100,00	-	-	-	1,120,000	47.06	100,00	1,260,000
Belanja Barang Jasa	2,380,000	-	2,380,000	1,120,000	47.06	100,00	-	-	-	1,120,000	47.06	100,00	1,260,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,380,000	-	2,380,000	1,120,000	47.06	100,00	-	-	-	1,120,000	47.06	-	1,260,000
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	3,440,000	-	3,440,000	840,000	24.42	100,00				840,000	24.42	100,00	2,600,000
Belanja Barang Jasa	3,440,000	-	3,440,000	840,000	24.42	100,00				840,000	24.42	100,00	2,600,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,040,000	-	2,040,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,040,000
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,400,000	-	1,400,000	840,000	60.00	100,00	-	-	-	840,000	60.00	100,00	560,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	39,348,536	-	66,248,536	35,123,294	89.26	100,00				61,623,294	93.02	100,00	4,625,242
Belanja Barang Jasa	39,348,536	-	39,348,536	35,123,294	89.26	100,00				35,123,294	89.26	100,00	4,225,242
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,291,850	-	1,291,850	1,283,000	99.31	100,00	-	-	-	1,283,000	99.31	100,00	8,850
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	1,384,436	-	1,384,436	1,375,500	99.35	100,00	-	-	-	1,375,500	99.35	100,00	8,936
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	9,790,000	-	9,790,000	9,560,000	97.65	100,00	-	-	-	9,560,000	97.65	100,00	230,000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,082,250	-	1,082,250	1,065,000	98.41	100,00	-	-	-	1,065,000	98.41	100,00	17,250
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25,800,000	-	25,800,000	21,839,794	84.65	100,00	-	-	-	21,839,794	84.65	100,00	3,960,206
Belanja Modal	-	26,900,000	26,900,000	-	-	-	26,500,000	100,00	100,00	26,500,000	98.51	100,00	400,000
Belanja Modal Personal Komputer	-	26,900,000	26,900,000	-	-	-	26,500,000	100,00	100,00	26,500,000	98.51	100,00	400,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	27,000,350	-	27,000,350	13,617,250	50.43	100,00				13,617,250	50.43	100,00	13,383,100

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI					TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)		
				BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	FISIK (%)	(Rp)			(%)
Belanja Barang Jasa	27,000,350		27,000,350	13,617,250	50.43	100,00				13,617,250	50.43	100,00	13,383,100
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	24,200,350		24,200,350	13,617,250	56.27	100,00				13,617,250	56.27	100,00	10,583,100
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	2,800,000		2,800,000	-	-					-			2,800,000
Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	700,000		700,000	-	-					-			700,000
Belanja Barang Jasa	700,000		700,000	-	-					-			700,000
Belanja Perjalanan Dinas dalam Kota	700,000		700,000	-	-					-			700,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	19,200,000		19,200,000	17,810,000	92.76	100,00				17,810,000	92.76	100,00	1,390,000
Belanja Barang Jasa	19,200,000		19,200,000	17,810,000	92.76	100,00				17,810,000	92.76	100,00	1,390,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	19,200,000		19,200,000	17,810,000	92.76	100,00				17,810,000	92.76	100,00	1,390,000
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	40,000,000	-	40,000,000	30,750,000	76.88	100,00	-	-	-	30,750,000	76.88	100,00	9,250,000
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	40,000,000	-	40,000,000	30,750,000	76.88	100,00				30,750,000	76.88	100,00	9,250,000
Belanja Bantuan Sosial	40,000,000		40,000,000	30,750,000	76.88	100,00				30,750,000	76.88	100,00	9,250,000
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	40,000,000	-	40,000,000	30,750,000	76.88	100,00				30,750,000	76.88	100,00	9,250,000
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1,267,565,000	-	1,267,565,000	1,206,619,328	95.19	100,00				1,206,619,328.00	95.19	20.00	60,945,672
Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	3,480,000	-	3,480,000	3,110,000	89.37	100,00	-	-	-	3,110,000	89.37	100,00	370,000
Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	3,480,000	-	3,480,000	3,110,000	89.37	100,00				3,110,000	89.37	100,00	370,000
Belanja Barang Jasa	3,480,000		3,480,000	3,110,000	89.37	100,00	-	-	-	3,110,000	89.37	100,00	370,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3,480,000	-	3,480,000	3,110,000	89.37	100,00				3,110,000	89.37	100,00	370,000
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1,264,085,000	-	1,264,085,000	1,203,509,328	95.21	100,00	-	-	-	1,203,509,328	95.21	100,00	60,575,672
Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	78,235,400	-	78,235,400	63,856,571	81.62	100,00	-	-	-	63,856,571	81.62	100,00	14,378,829
Belanja Barang Jasa	78,235,400	-	78,235,400	63,856,571	81.62	100,00	-	-	-	63,856,571	81.62	100,00	14,378,829
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	395,400		395,400	198,300	50.15	100,00				198,300	50.15	100,00	197,100
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4,050,000		4,050,000	-									
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	73,790,000	-	73,790,000	63,658,271	86.27	100,00				63,658,271	86.27	100,00	10,131,729
Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	120,140,200	-	120,140,200	86,696,850	72.16	100,00				86,696,850	72.16	100,00	33,443,350
Belanja Barang Jasa	120,140,200	-	120,140,200	86,696,850	72.16	100,00				86,696,850	72.16	100,00	33,443,350
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3,160,200		3,160,200	2,896,850	91.67	100,00				2,896,850	91.67	100,00	263,350
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	26,000,000		26,000,000	24,400,000	93.85	100,00				24,400,000	93.85	100,00	1,600,000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	90,000,000		90,000,000	59,400,000	66.00	100,00				59,400,000	66.00	100,00	30,600,000
Belanja Perjalanan Dalam Kota	980,000		980,000	-						-			980,000
Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	450,349,400	-	450,349,400	437,812,607	97.22	100,00	-	-	-	437,812,607	97.22	100,00	12,536,793
Belanja Barang Jasa	362,909,400	-	362,909,400	350,372,607	96.55	100,00	-	-	-	350,372,607	96.55	100,00	12,536,793
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	643,400		643,400	346,500	53.85	100,00				346,500	53.85	100,00	296,900
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas -Kertas dan Cover	1,986,000		1,986,000	1,845,000	92.90	100,00				1,845,000	92.90	100,00	141,000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI						TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)		
				BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	FISIK (%)	(Rp)		(%)	
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1,075,000	-	1,075,000	1,018,000	94.70	100,00	-	-	-	1,018,000	94.70	100,00	57,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6,500,000	-	6,500,000	6,125,000	94.23	100,00	-	-	-	6,125,000	94.23	100,00	375,000
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	17,355,000	-	17,355,000	16,770,000	96.63	100,00	-	-	-	16,770,000	96.63	100,00	585,000
Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	292,500,000	-	292,500,000	292,500,000	100.00	100,00	-	-	-	292,500,000	100.00	100,00	-
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	42,850,000	-	42,850,000	31,768,107	74.14	100,00	-	-	-	31,768,107	74.14	100,00	11,081,893
Belanja Bantuan Sosial	87,440,000	-	87,440,000	87,440,000	100.00	100,00	-	-	-	87,440,000	100.00	100,00	-
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	87,440,000	-	87,440,000	87,440,000	100.00	100,00	-	-	-	87,440,000	100.00	100,00	-
Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	615,360,000	-	615,360,000	615,143,300	99.96	100,00	-	-	-	615,143,300	99.96	100,00	216,700
Belanja Barang Jasa	65,360,000	-	65,360,000	65,143,300	99.67	100,00	-	-	-	65,143,300	99.67	100,00	216,700
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	62,280,000	-	62,280,000	62,273,300	99.99	100,00	-	-	-	62,273,300	99.99	100,00	6,700
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3,080,000	-	3,080,000	2,870,000	93.18	100,00	-	-	-	2,870,000	93.18	100,00	210,000
Belanja Bantuan Sosial	550,000,000	-	550,000,000	550,000,000	100.00	100,00	-	-	-	550,000,000	100.00	100,00	-
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu	100,000,000	-	100,000,000	100,000,000	100.00	100,00	-	-	-	100,000,000	100.00	-	-
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Kelompok Masyarakat	450,000,000	-	450,000,000	450,000,000	100.00	100,00	-	-	-	450,000,000	100.00	100,00	-
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	917,218,150	64,800,000	982,018,150	671,374,763	73.20	100,00	-	-	-	735,474,763	74.89	100,00	246,543,387
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	500,478,150	64,800,000	565,278,150	268,014,763	65.16	100,00	-	-	-	332,114,763	58.75	100,00	233,163,387
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	327,697,350	-	327,697,350	213,529,163	65.16	100,00	-	-	-	213,529,163	65.16	100,00	114,168,187
Belanja Barang Jasa	226,760,550	-	226,760,550	181,627,403	80.10	100,00	-	-	-	181,627,403	80.10	100,00	45,133,147
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	28,365,000	-	28,365,000	17,846,887	62.92	100,00	-	-	-	17,846,887	62.92	100,00	10,518,113
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	550	-	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1,760,000	-	1,760,000	700,000	39.77	100,00	-	-	-	700,000	39.77	-	1,060,000
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	19,635,000	-	19,635,000	18,810,000	95.80	100,00	-	-	-	18,810,000	95.80	-	825,000
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	31,350,000	-	31,350,000	11,100,000	35.41	100,00	-	-	-	11,100,000	35.41	100,00	20,250,000
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5,280,000	-	5,280,000	4,320,000	81.82	100,00	-	-	-	4,320,000	81.82	100,00	960,000
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	80,690,000	-	80,690,000	79,893,500	99.01	100,00	-	-	-	79,893,500	99.01	100,00	796,500
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	51,000,000	-	51,000,000	45,117,016	88.46	100,00	-	-	-	45,117,016	88.46	100,00	5,882,984
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8,680,000	-	8,680,000	3,840,000	44.24	100,00	-	-	-	3,840,000	44.24	100,00	4,840,000
Belanja Bantuan Sosial	100,936,800	-	100,936,800	31,901,760	31.61	100,00	-	-	-	31,901,760	31.61	100,00	69,035,040
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	100,936,800	-	100,936,800	31,901,760	31.61	100,00	-	-	-	31,901,760	31.61	100,00	69,035,040
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	159,580,800	-	159,580,800	50,265,600	31.50	100,00	-	-	-	50,265,600	31.50	100,00	109,315,200
Belanja Bantuan Sosial	159,580,800	-	159,580,800	50,265,600	31.50	100,00	-	-	-	50,265,600	31.50	100,00	109,315,200
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu	98,940,096	-	98,940,096	50,265,600	50.80	100,00	-	-	-	50,265,600	50.80	100,00	48,674,496
Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	60,640,704	-	60,640,704	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60,640,704
Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	-	64,800,000	64,800,000	-	-	-	64,100,000	98.92	100,00	64,100,000	98.92	100,00	700,000
Belanja Modal	-	64,800,000	64,800,000	-	-	-	64,100,000	98.92	100,00	64,100,000	98.92	100,00	700,000
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	-	64,800,000	64,800,000	-	-	-	64,100,000	98.92	100,00	64,100,000	98.92	100,00	700,000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN	PAGU ANGGARAN (Rp.)		JUMLAH ANGGARAN	REALISASI					TOTAL REALISASI			SISA ANGGARAN	
	BELANJA OPERASI	BELANJA MODAL		KEUANGAN		FISIK (%)	KEUANGAN		KEUANGAN		FISIK (%)		
				BELANJA OPERASI	KEU (%)		BELANJA MODAL	KEU (%)	FISIK (%)	(Rp)			(%)
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13,200,000		13,200,000	4,220,000	31.97	100,00				4,220,000	31.97	100,00	8,980,000
Belanja Barang Jasa	4,800,000		4,800,000	1,120,000	23.33	100,00				1,120,000	23.33	100,00	3,680,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	4,800,000		4,800,000	1,120,000	23.33	100,00				1,120,000	23.33	100,00	3,680,000
Belanja Bantuan Sosial	8,400,000		8,400,000	3,100,000	36.90	100,00				3,100,000	36.90	100,00	5,300,000
Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan Kepada Individu	8,400,000		8,400,000	3,100,000	36.90	100,00				3,100,000	36.90	100,00	5,300,000
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	416,740,000	-	416,740,000	403,360,000	96.79	100,00	-	-	-	403,360,000	96.79	100,00	13,380,000
Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	416,740,000	-	416,740,000	403,360,000	96.79	100,00	-	-	-	403,360,000	96.79	100,00	13,380,000
Belanja Barang Jasa	16,740,000	-	16,740,000	3,360,000	20.07	100,00	-	-	-	3,360,000	20.07	100,00	13,380,000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,420,000	-	3,420,000	3,360,000	98.25	100,00	-	-	-	3,360,000	98.25	100,00	60,000
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,320,000	-	13,320,000	-						-			13,320,000
Belanja Bantuan Sosial	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	100,00	100,00	-	-	-	400,000,000	100,00	100,00	-
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	400,000,000	-	400,000,000	400,000,000	100,00	100,00	-	-	-	400,000,000	100,00	100,00	-
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	126,783,800	-	126,783,800	125,798,033	99.22	100,00	-	-	-	125,798,033.00	99.22	100,00	985,767
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasionaonal Kabupaten/Kota	126,783,800	-	126,783,800	125,798,033	99.22	100,00	-	-	-	125,798,033	99.22	100,00	985,767
Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makan Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	126,783,800	-	126,783,800	125,798,033	99.22	100,00	-	-	-	125,798,033	99.22	100,00	985,767
Belanja Barang Jasa	106,783,800	-	106,783,800	105,798,033	99.08	100,00				105,798,033	99.08	100,00	985,767
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	1,591,800		1,591,800	1,458,600	91.63	100,00				1,458,600	91.63	100,00	133,200
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3,040,000		3,040,000	3,040,000	100,00	100,00				3,040,000	100,00	100,00	-
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	6,840,000		6,840,000	6,720,000	98.25	100,00				6,720,000	98.25	100,00	120,000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	32,400,000		32,400,000	32,400,000	100,00	100,00				32,400,000	100,00	100,00	-
Belanja Sewa Mebel	1,000,000		1,000,000	1,000,000	100,00	100,00				1,000,000	100,00	100,00	-
Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800,000		800,000	800,000	100,00	100,00				800,000	100,00	100,00	-
Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	100,00	100,00				2,000,000	100,00	-	-
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	59,112,000		59,112,000	58,379,433	98.76	100,00				58,379,433	98.76	100,00	732,567
Belanja Bantuan Sosial	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	100,00	100,00				20,000,000	100,00	100,00	-
Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada individu	20,000,000	-	20,000,000	20,000,000	100,00	100,00				20,000,000	100,00	100,00	-
JUMLAH BELANJA	8,733,383,700	91,700,000	8,825,083,700	7,775,062,198	89.03	100,00	-	-	-	7,865,662,198	89.13	100,00	959,421,502

Nomor HP : 0812 5098 161

Sampit, Januari 2024
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kotawaringin



HA WIANAN, S.Sos
Kabina Utama Muda / IV/c
NIP. 19680415 198911 1 001

SARANA DAN PRASARANA
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWRAINGIN TIMUR

NO	URAIAN	JUMLAH	NILAI	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	4	1,175,135,500	Baik
2	Tanah Bangunan Kantor Permanen	1	509,500,000	Baik
3	Tanah Untuk Makam Pahlawan	2	262,635,500	Baik
4	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1	120,000,000,000	Baik
5	Kendaraan Bermotor Penumpang	1	320,050,000	Baik
6	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1	436,160,000	Baik
7	Kendaraan Bermotor Ruda Dua	9	168,772,345	Baik
8	Alat Bengkel dan Alat Ukur	7	26,553,000	Baik
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	87	240,212,798	Baik
10	Alat Pembersih	6	32,612,344	Baik
11	Alat Pendingin	17	73,018,052	Baik
12	Alat Dapur	8	6,274,400	Baik
13	Alat rumah tangga lainnya	10	13,167,000	Baik
14	Meja dan Kursi Kerja Rapat/Pejabat	33	49,618,000	Baik
15	Meja Kerja Pejabat	11	19,810,000	Baik
16	Kursi Kerja Pejabat	18	21,822,000	Baik
17	Alat Studio	4	30,142,200	Baik
18	Alat Studio	3	26,292,200	Baik
19	Alat Laboratorium	37	19,902,500	Baik
20	Alat Laboratorium Geofisika	32	16,000,000	Baik
21	Komputer	74	413,894,006	Baik
22	Alat Komputer	43	104,850,438	Baik
23	Personal komputer	42	93,100,438	Baik
24	Gedung dan Bangunan	27	6,690,215,752	Baik
25	Bangunan Gedung	23	6,458,338,752	Baik
26	Monumen	4	231,877,000	Baik
27	Tugu	3	175,912,000	Baik
28	Makam Bersejarah	1	55,965,000	Baik
29	Laptop	1	26,500,000	Baik
30	Pengadaan Tenda Kemah	2	64,100,000	Baik
Total		602	137,762,431,225	Baik

**DOKUMENTASI PROGRAM/KEGIATAN
DINAS SOSIAL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TA. 2024**

Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Yang Diberdayakan

✚ Taruna Siaga Bencana (TAGANA)



✚ Pendamping SDM Program Keluarga Harapan (PKH)





Warga Migran Yang Dipulangkan Ke Daerah Asal



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Tertangani

- ✚ Penyaluran Bantuan Sosial Alat Bantu (Kursi Roda) Pada Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSAN) Bagi Penyandang Disabilitas



🚩 Penyaluran Bantuan Permakanan dan Sandang Bagi Penyandang Disabilitas, Lansia dan Anak Terlantar.



✚ Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga



✚ Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat



- ✚ Pemberian Layanan Data dan Pengaduan (Laporan langsung mengenai terdapat ODGJ berjenis kelamin perempuan yang mengganggu pembeli di tokonya oleh ibu Isnaini, 7 Maret 2024)



- ✚ Pemberian Layanan Kedaruratan (Pemberian layanan kedaruratan krn mengganggu masyarakat yg melintas diamankan di IGD RSUD dan kemudian dilaksanakan rawat inap di ruangan teratai, 20 Desember 2024)



✚ Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga



✚ Pemberian Layanan Rujukan (Dinas sosial melaksanakan rujukan penyandang disabilitas mental atas nama D ke Panti Rehabilitasi Kejiwaan Joint Adulam Ministry (Panti JAM) di Palangkaraya, 15 November 2024)



Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Yang Memperoleh Bantuan Sosial

✚ Penyaluran Bantuan Permakanan dan Sandang Bagi Korban Kebakaran



Ketersediaan Tenaga Terampil TAGANA



Taman makam Pahlawan Yang Terpelihara



PENGHARGAAN INOVASI TIM PANGKAS

(Optimalisasi Penjangkauan dan Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)

